REVIEW
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2013-2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Sukabumi Nomor 1 Telepon : (022) 7207257 – 7272258 Fasimili : (022) 7202163
Website : www.dishub.jabarprov.go.id e-mail : dishub@jabarprov.go.id
Bandung - 40271

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Sukabumi No. 1, Telp : (022) 7207257 – 7272258 Fax: (022) 7202163
Website: www.dishub.jabarprov.go.id, email: dishub@jabarprov.go.id
BANDUNG 40271

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 118.4/189/Sekre.

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan review Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;

b. bahwa sebagai implementasi dari kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang merujuk kepada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta sebagai bahan pedoman perencanaan di bidang perhubungan;

c. bahwa menindaklanjuti hasil review AKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2014 dan tanggal 23 Januari 2015, perlu adanya penyesuaian misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;

d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tentang Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 - 2025;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1134 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah penganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tanggal 6 Januari 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 nomor 5 seri E);
31. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018**

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas tentang Review Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, selanjutnya disebut Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang merupakan rencana lima tahun kedepan untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

KETIGA : Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang merupakan rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan sistematika yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

(I) Pendahuluan;
(II) Gambaran Pelayanan OPD;
(III) Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi,
(IV) Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan
(V) Rencama Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,
(VI) Penutup
(VII) Lampiran.

KEEMPAT : Isi dan uraian Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga di atas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Februari 2015.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Dr. H. DEDI FAUFIK, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat;

KATA PENGANTAR

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 dan telah disahkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun dan dirumuskan oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, serta telah dilakukan uji publik melalui forum SKPD Renstra 2013-2018.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan tersusunnya Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini, diharapkan dapat menjadi arah dan acuan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Barat, baik dari kalangan aparatur itu sendiri maupun mitra kerja, akademisi dan masyarakat luas.

Bandung, 24 - 2 - 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671011 199303 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1. Latar Belakang ..... I – 1

1.2. Landasan Hukum ..... I – 8

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 11

1.4. Sistematika Penulisan ..... I – 12

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT ..... II – 1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... II – 1

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... II – 26

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat .. II – 33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... II – 47

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..... III – 1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... III – 1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III – 6

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat/Kab/Kota ..... III – 12

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III – 20

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..... III – 24

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... IV – 1

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... IV – 1

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... IV – 2

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ..... IV – 4

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... V – 1

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... VI – 1

BAB VII : PENUTUP ..... VII – 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Formulir S-1
2. Formulir S-2
3. Formulir S-3
4. Formulir S-4
5. Formulir S-5
6. Data-data kepegawaian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2008 – 2012 dan Data Kepegawaian Tahun 2014 serta Rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2013 – 2018
7. Struktur Organisasi UPTD / Balai di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarakan Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran III disebutkan bahwa Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

Ruang lingkup pelaksanaan reviu antara lain adalah Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis ditingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk OPD yang dilakukan reviu dan penelaahan penyelenggaraan SAKIP oleh Kemenpan R.I. Atas reviu tersebut perlu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian perencanaan strategis khususnya keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Daerah meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa RPJM Daerah ketiga (2013 – 2018) ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Prioritas pembangunan pada tahap ini khususnya Bidang Infrastruktur Wilayah dapat diuraikan bahwa pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Jawa Barat yang produktif dan memiliki daya saing. Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai dengan berkembangnya sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*) dan jaringan infrastruktur transportasi.

Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2013 telah berhasil meletakkan landasan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjaga sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat berfungsi dengan baik.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Hal ini menjadi penting mengingat Rencana Kerja (Renja) - SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra SKPD merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Renstra SKPD harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat khususnya bidang perhubungan, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 juga memperhatikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan penunjang penggerak pembangunan di Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi untuk peningkatan aksebilitas pergerakan orang, barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pembangunan perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara.

Mengingat pembangunan perhubungan berdampak *signifikan* terhadap kondisi perekonomian regional dan nasional, maka kebijakan dan strategi pembangunan perhubungan kedepan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian regional maupun nasional. Prospek perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, proses atau tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan dan langkah-langka sebagai berikut:

1. **Tahap Pertama :** Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. OPD menerima rancangan awal RPJMD secara resmi dari Kepala Bappeda.
   b. Pembentukan Tim penyusunan Renstra OPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

c. Tim Fasilitasi menyiapkan rancangan awal Renstra OPD, dengan memperhatikan:
   1) bagi pemerintah kabupaten dan kota, memperhatikan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota;
   2) bagi pemerintah provinsi, memperhatikan hasil musrenbang kabupaten dan kota, rancangan Renja KL, dan rancangan awal RPJMD hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;
d. Merumuskan rancangan awal Renstra OPD berisi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RPJMD serta memperhatikan tupoksi OPD dan alokasi anggaran indikatif;
e. Menyiapkan FGD yang secara khusus untuk membahas Renstra OPD.
f. Menyampaikan Rancangan Renstra OPD dari Kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk dilkukan Verifikasi Awal.
g. Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Renstra OPD, dengan memperhatikan :
   1. Penjabaran sasaran prioritas Kepala Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD ke dalam sasaran strategis OPD;
   2. Konsistensi penjabaran kebijakan OPD dengan Rancangan Awal RPJMD;
   3. Konsistensi program dan kegiatan OPD sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMD yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
   4. Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program OPD dengan program prioritas Kepala Daerah ;
   5. Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan OPD dengan sasaran hasil (outcome) program OPD; serta
   6. Sumberdaya yang diperlukan

2. **Tahap Kedua :** Penyelenggaraan Forum Dengar Pendapat Publik Mengenai Forum Dengar Pendapat Publik dijelaskan tersendiri dalam Lampiran X Petunjuk Teknis Perencanaan daerah ini.

3. **Tahap Ketiga :** Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD
   a. OPD menyusun rancangan akhir Renstra OPD dengan memanfaatkan hasil Forum Dengar Pendapat Publik;
   b. Penyusunan Rancangan Akhir berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
   c. Penyusunan Rancangan Akhir berdasarkan pada penajaman Visi dan Misi serta penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun penyelarasan mencakup :
      1) Penajaman kembali rumusan tujuan OPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
      2) Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan berdasarkan RPJMD;
      3) Penyesuaian program prioritas OPD yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
      4) Penajaman indikator kinerja urusan sesuai tugas dan fungsi;
      5) Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
4. **Tahap Keempat :** Penetapan Peraturan Kepala OPD tentang Renstra OPD
   a. OPD menyempurnakan rancangan akhir Renstra OPD sesuai hasil konsultasi dengan Bappeda.
   b. OPD menyampaikan rancangan akhir Renstra OPD disampaikan kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah.
   c. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD;
   d. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
   e. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah;
   f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah

Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah:

1. RPJMD Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2010 – 2014, Renstra Kementerian/ Lembaga dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
2. RPJMD Tahun 2013 – 2018 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008).
3. RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2014, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 - 2018 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014, serta seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Proses atau tahapan penyusunan Renstra Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 telah dilaksanakan pada penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 sebelum reviu.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1134 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 20018 adalah agar terwujud keselarasan antara perencanaan strategis ditingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya sehingga Renstra 2013 – 2018 dapat memberikan acuan, arah, dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di bidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan perhubungan (transportasi) , dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten/Kota, wilayah provinsi maupun wilayah nasional.

Dengan Reviu diharapkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 memiliki Indikator kinerja yang dapat memberikan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Dan selaras antar tingkatan unit organisasi serta memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu, sehingga memudahkan dalam Pengukuran Kinerja.

Disamping itu juga adalah menyatukan persepsi, interpretasi dan aksi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik teknis-operasional maupun strategis-konseptual.

Adpaun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sejak semula adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013-2018.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan perhubungan di Provinsi Jawa Barat yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Gambaran Kinerja pelayanan OPD dapat dijelaskan pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD (**Formulir S-1**) serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD (**Formulir S-2**).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. dan faktor-faktor penghambat serta pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya, dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa

saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi Jangka Menengah OPD.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh OPD pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja OPD selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Adapun dalam penentuan Visi OPD, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi OPD;
2. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh OPD, dan mengacu kepada Visi RPJMD;
3. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
4. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
5. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
6. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
7. Menjelaskan Misi berdasarkan sasasarannya yang harus dilakukan OPD pada tahun rencana, dalam rangka mencapai visi OPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya, adapun penyajian tujuan dan sasaran jangka

menengah OPD dilengkapi dengan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD (**Formulir S-3**).

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, sebagaimana tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD (**Formulir S-4**).

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM, dengan dilengkapi tabel Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (**Formulir S-5**).

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen OPD terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tabel/Format yang dirancang untuk membantu Bappeda dan OPD untuk mengorganisasikan penyusunan dokumen Renstra OPD agar lebih efektif. Tabel/format dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah; ketersediaan data dan informasi; serta ketersediaan sumber daya dan dana untuk melaksanakannya.
2. Data dan informasi pendukung
3. Daftar istilah/*glossary* dan daftar pustaka.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

2.1.1. *Tugas Pokok*

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.1.2. *Fungsi*

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan sistem operasional transportasi;
c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan bina sistem operasional transportasi;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

2.1.3. *Kewenangan*

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas juga telah dilengkapi dengan peraturan daerah yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan diatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Penyelenggaraan Perhubungan Udara. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Darat, yaitu:
   1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan provinsi;
   2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
   3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;
   4. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
   5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
   6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
   7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;
   8. Pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam Provinsi;
   9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;
   10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
   11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
   12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
   13. Pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
   14. Pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;

15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;
16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan Provinsi;
19. Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas di jalan Provinsi;
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan Provinsi;
21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
22. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
23. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan Provinsi;
24. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
    a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalulintas dan angkutan jalan;
    b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
    d. perizinan angkutan umum.
25. Pembentukan dan penetapan forum lalulintas dan angkutan jalan.

B. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah :
1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
2. Pembinaan dalam :
    a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
    b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
    c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
3. Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.

C. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah :

1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (gt≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :
   a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
   b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
   c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
   d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
   e. Pelaksanaan pengukuran kapal;
   f. Penerbitan pas perairan daratan;
   g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;

2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
4. Pengelolaan pelabuhan regional lama;
5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
7. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
14. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional hub;
15. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional;
16. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut nasional;
17. Penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
18. Izin reklamasi di dalam dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
20. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;

23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
24. Penetapan duks di pelabuhan regional;
25. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
26. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
27. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas);
28. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
30. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur *(tramper)* bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
31. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur *(liner)* dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur *(tramper)* bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan internasional (lintas batas);
32. Izin usaha *tally* di pelabuhan;
33. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
34. Izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*;
35. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
36. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;

37. Izin usaha depo peti kemas;
38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jalan provinsi;
40. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
41. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
42. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
43. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
44. Penetapan kelas alur pelayaran sungai;
45. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
46. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
47. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
48. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
49. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
50. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
51. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sdp antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
52. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
53. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
54. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi; dan
55. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan Sungan Danau dan Penyebrangan.

D. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Udara adalah :

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
8. Persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non berjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan kepada Pemerintah;
13. Pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;
15. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;
16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU;

17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
18. Pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
19. Pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
20. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
21. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
22. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
23. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.
24. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
25. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
26. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan

kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;

27. Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
28. Pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
29. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
30. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
31. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
32. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
33. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
34. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
35. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;

36. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
37. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi:
    a. Investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
    b. Monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
    c. Membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini.

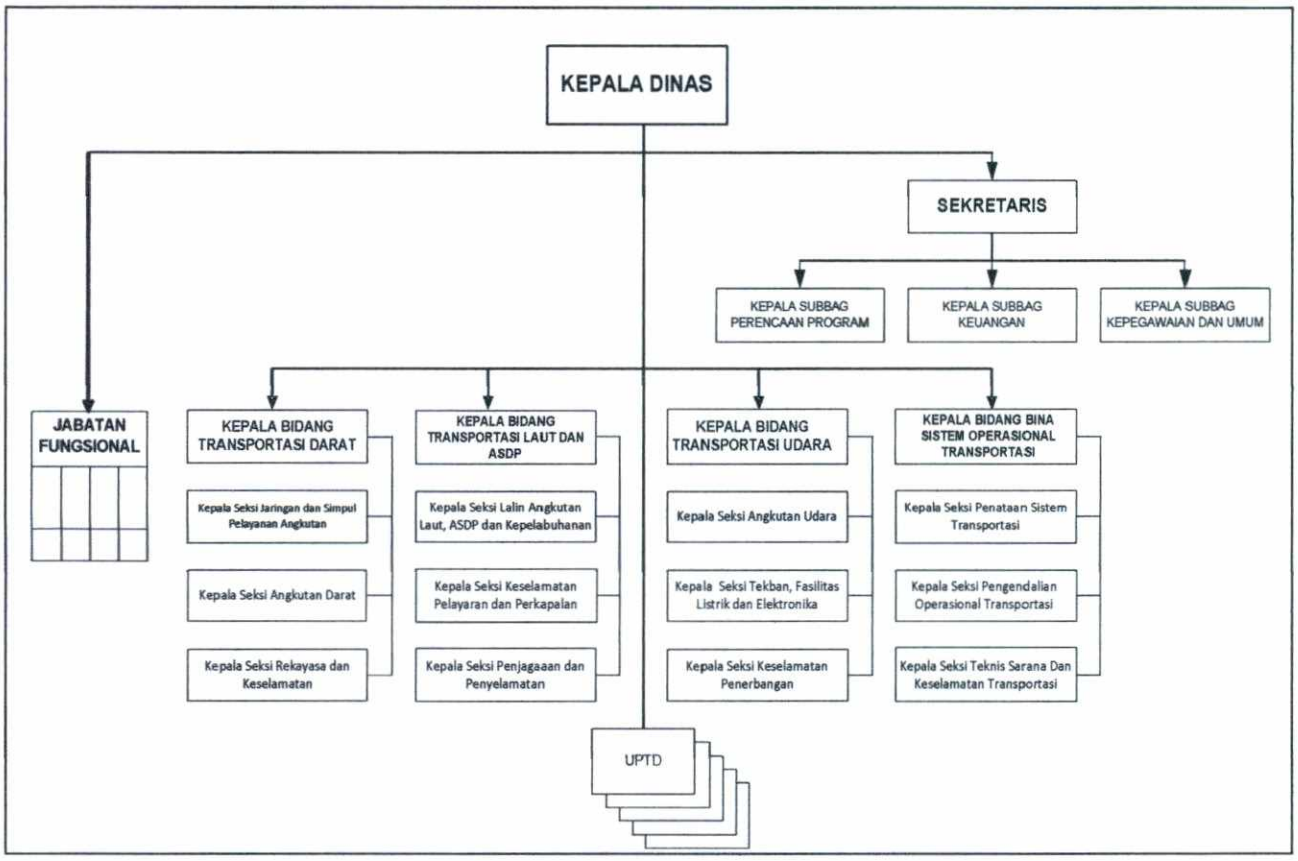

Gambar 2.1.4
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada lampiran.

2.1.5. Tugas pokok, Fungsi dsan Rincian Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian kedua kepala dinas pasal 3 adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional transportasi;
   b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas perhubungan;
   c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
   d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas :

   a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
   b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
   c. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perhubungan di Daerah;

d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan sistem operasional transportasi;
e. menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
f. menyelenggarakan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina sistem operasional transportasi;
j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka pelayanan umum perhubungan;
k. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

2.1.6. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian ketiga Sekretariat pasal 4 adalah sebagai berikut:

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

(3) Rincian Tugas Sekretariat

a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan, program Dinas;
b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
d. menyelenggarakan pengkajian pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengkajian administrasi pendapatan belanja;
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
j. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
l. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat, dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian yaitu:

a. Subbagian Perencanaan dan Program;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2.1.7. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian keempat Bidang Transportasi Darat pasal 8 adalah sebagai berikut

(1) Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi darat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi darat;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi darat;
c. penyelenggaraan fasilitasi transportasi darat.

(3) Rincian Tugas Bidang Transportasi Darat

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Darat;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan darat;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa dan keselamatan;
d. menyelenggarakan fasilitasi transportasi darat;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi darat;
f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan transportasi darat;
g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Darat;
i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Transportasi Darat, dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan;
b. Seksi Angkutan Darat;
c. Seksi Rekayasa dan Keselamatan.

2.1.8. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang Transportasi Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian kelima Bidang Transportasi Laut dan ASDP pasal 12 adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi laut dan sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Laut dan ASDP mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi laut dan ASDP;
b. penyelenggaraan fasilitasi transportasi laut dan ASDP.

(3) Rincian Tugas Bidang Transportasi Laut dan ASDP

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Laut dan ASDP;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi transportasi laut dan ASDP;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi lalulintas angkutan laut, ASDP dan kepelabuhanan;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keselamatan pelayaran dan perkapalan;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penjagaan dan penyelamatan, transportasi laut dan ASDP;
f. menyelenggarakan fasilitasi transportasi laut dan ASDP;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi laut dan ASDP;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas Dinas di Kabupaten/Kota;
j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Laut dan ASDP;
k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya; .

(4) Bidang Transportasi Laut dan ASDP, dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:
a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, ASDP dan Kepelabuhan;
b. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan;
c. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.

2.1.9. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian keenam Bidang Transportasi Udara pasal 16 adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Transportasi Udara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi udara.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transportasi Udara mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi udara;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi udara;
c. penyelenggaraan fasilitasi bidang transportasi udara.

(3) Rincian Tugas Bidang Transportasi Udara
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi Udara;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi transportasi udara;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan udara;.
d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknik bandara, fasilitas listrik dan elektronika;

e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keselamatan penerbangan;
f. menyelenggarakan fasilitasi transportasi udara;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi transportasi udara;
h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas Dinas di Kabupaten/Kota;
j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Transportasi Udara;
k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

(4) Bidang Transportasi Udara, dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:
a. Seksi Angkutan Udara;
b. Seksi Teknik Bandara, Fasilitas Listrik dan Elektronika;
c. Seksi Keselamatan Penerbangan.

2.1.10. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian ketujuh Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi pasal 20 adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sistem operasional transportasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sistem operasional transportasi;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sistem operasional transportasi;
c. penyelenggaraan fasilitasi sistem operasional transportasi.

(3) Rincian Tugas Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penataan sistem transportasi;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian operasional;
d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknis sarana dan keselamatan transportasi;
e. menyelenggarakan fasilitasi sistem operasional transportasi;
f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan sistem operasional transportasi;
g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi;
j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi, dibagi dalam 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Penataan Sistem Transportasi;
b. Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;
c. Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi

2.1.11. Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bagian kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas pasal 24 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa BaratBab III Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit.

A. Bagian Kesatu UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I Paragraf 1 UPTD Pasal 3, yaitu:

(1) UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan dan pengendalian, penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan di wilayah Bogor-Purwakarta.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian, penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan; dan

b. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan bermuatan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.

(3) Rincian tugas UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I yaitu:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian, penimbangan kendaraan bermuatan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan;

c. menyelenggarakan operasional pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor AKDP di jalan;

d. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan angkutan barang di jembatan timbang;

e. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses penimbangan angkutan barang dan/atau peti kemas;
f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum AKDP di terminal;
g. menyelenggarakan pemantauan kegiatan pelayanan angkutan pada setiap lintasan trayek;
h. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses perijinan trayek kendaraan bermotor umum AKDP;
i. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses perijinan kendaraan bermotor bermuatan angkutan barang;
j. menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan di jalan;
k. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I;
l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan intansi terkait;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Lalu Lintas;
d. Seksi Angkutan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Sub Unit Pelayanan

B. Bagian Kedua UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II

Paragraf 1 UPTD Pasal 8

(1) UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan dan

pengendalian, penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan di wilayah Cirebon-Priangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian, penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan; dan
b. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan bermuatan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.

(3) Rincian tugas UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II yaitu:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan bermuatan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum AKDP serta pengaturan teknis sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. menyelenggarakan operasional pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor Angkutan Umum AKDP di jalan;
d. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penimbangan kendaraan angkutan barang di jembatan timbang;
e. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses penimbangan angkutan barang dan/atau peti kemas;
f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan umum AKDP di terminal;
g. menyelenggarakan pemantauan kegiatan pelayanan angkutan pada setiap lintasan trayek;

h. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses perijinan trayek kendaraan bermotor umum AKDP;
i. menyelenggarakan bahan rekomendasi teknis untuk proses perijinan kendaraan bermotor bermuatan angkutan barang;
j. menyelenggarakan penyidikan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan di jalan;
k. menyelenggarakan ketatausahaan UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II;
l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. menyelenggarakan koordinasi dengan intansi terkait;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Lalu Lintas;
d. Seksi Angkutan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Sub Unit Pelayanan.

C. Bagian Ketiga Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Paragraf 1 Balai Pasal 13

(1) Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsí Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan laut, angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
b. penyelenggaraan pelayanan, pengendalian dan pengawasan lalulintas dan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

(3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis operasional pengelolaan pelabuhan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
c. menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan kelancaran lalulintas dan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan trayek dan usaha angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
e. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana pelabuhan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
f. menyelenggarakan pengaturan operasional pelabuhan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
g. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pelayaran;
h. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi pendaftaran ulang (registrasi) dan pemeriksaan perijinan sarana angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
i. menyelenggarakan pemberian surat tanda kecakapan;
j. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi penerbitan sertifikasi kelaikan kapal dan tugas pembantuan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
k. menyelenggarakan pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran;
l. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Seksi Tata Operasional dan Keselamatan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Sub Unit Pelayanan.

D. Bagian Keempat Balai Pengelolaan Bandar Udara Paragraf 1 Balai Pasal 18

(1) Balai Pengelolaan Bandar Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan bandar udara dan pengembangan jaringan transportasi udara.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Bandar Udara mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan bandar udara dan pengembangan jaringan transportasi udara; dan
b. penyelenggaraan pengelolaan bandar udara dan pengembangan jaringan transportasi udara.

(3) Rincian tugas Balai Pengelolaan Bandar Udara yaitu:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Bandar Udara;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan bandar udara dan pengembangan jaringan transportasi udara;

c. menyelenggarakan pengelolaan bandar udara dan pengembangan jaringan transportasi udara;
d. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas bandar udara;
e. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas bandar udara;
f. menyelenggarakan pengaturan kebandarudaraan;
g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Fasilitas Bandar Udara;
d. Seksi Operasi Bandar Udara;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Sub Unit Pelayanan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, sebagai instansi teknis yang bergerak dibidang transportasi, pada Tahun 2014 memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 357 Orang, dengan komposisi sebagaimana tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV/C	1
2	IV/B	4
3	IV/A	14
4	III/D	46
5	III/C	39
6	III/B	131
7	III/A	17
8	II/D	8
9	II/C	5
10	II/B	75
11	II/A	7
12	I/D	0
13	I/C	5
14	I/B	5
15	I/A	0
	JUMLAH	357

Gambar. 2.1
Prosentase Data PNS Berdasarkan Golongan
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014

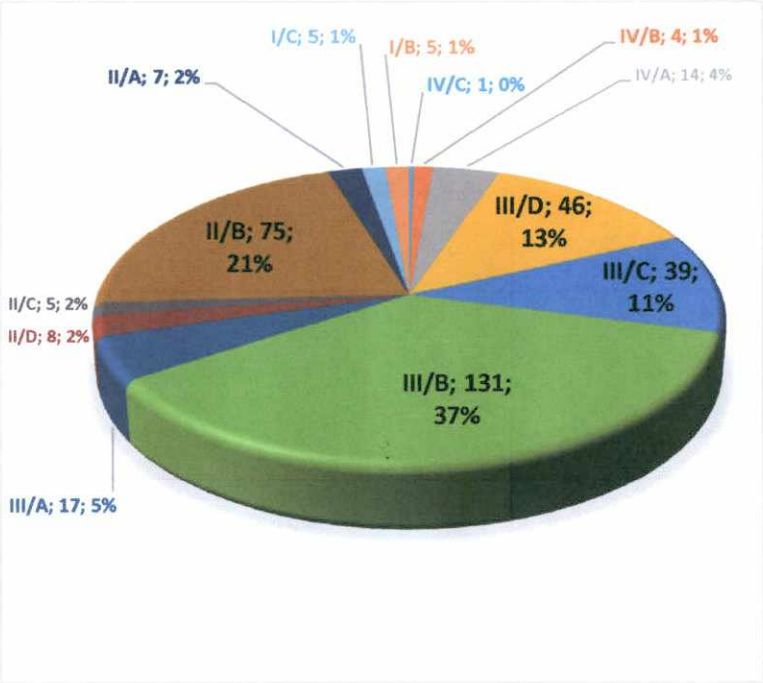

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2014

No.	TINGKAT IJAZAH	JUMLAH (ORANG)
1	S3	1
2	S2	35
3	S1	133
4	D4	3
5	SARMUD	0
6	D3	16
7	D2	4
8	D1	1
9	SLTA	147
10	SLTP	9
11	SD	8
	JUMLAH	357

Gambar 2.2
Prosentase Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2014

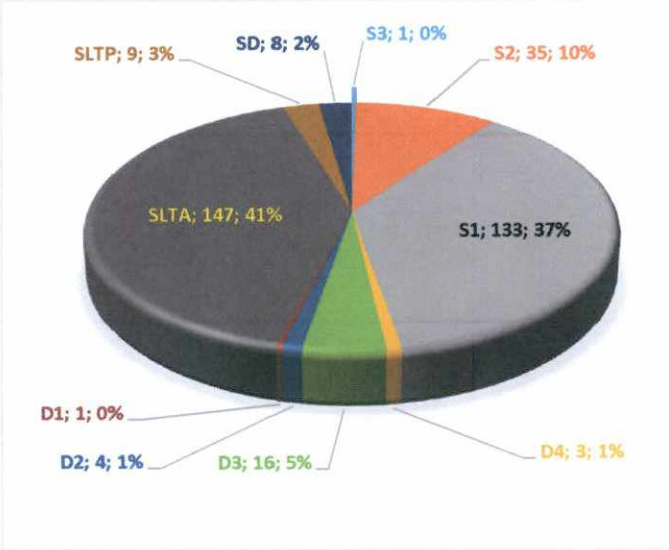

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Dari 357orang pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di tahun 2014, Golongan III/B memiliki jumlah paling banyak yaitu sebesar 131 Orang atau sebesar 36,69 %. Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan jumlah pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan SLTA mendominasi jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 41,18 %, sedangkan komposisi untuk Sarjana (S1) sebanyak 37,25 %, Pascasarjana (S2) sebanyak 9,80%dan Doktoral (S3) sebesar 0.28 %.

Untuk jumlah pegawai berdasarkan usia pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia
Tahun 2014

No.	TINGKAT USIA	JUMLAH (ORANG)
1	20 - 24	0
2	25 - 29	5
3	30 - 34	22
4	35 - 39	33
5	40 - 44	63
6	45 - 49	99
7	50 - 54	86
8	55 <	49
	JUMLAH	357

Gambar 2.3
Prosentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia
Tahun 2014

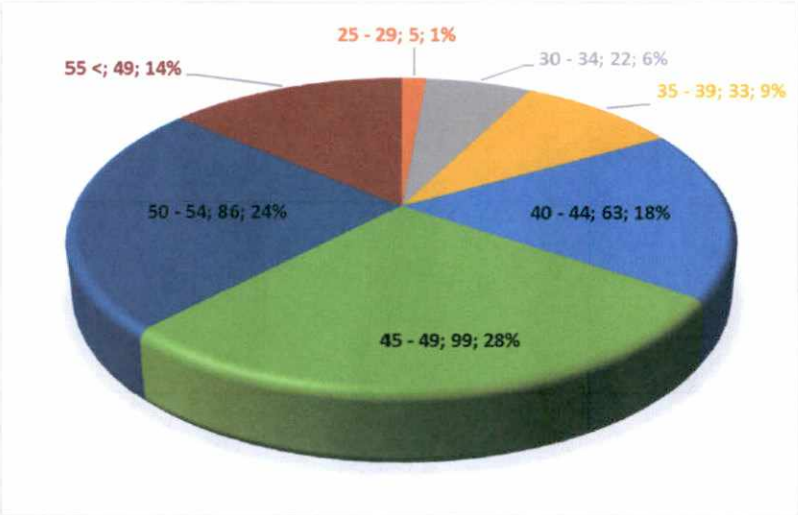

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Dan Usia Tahun 2014

No.	TINGKAT USIA	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	SARMUD	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	20 - 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25 - 29	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	5
3	30 - 34	0	1	8	0	0	0	0	0	12	1	0	22
4	35 - 39	0	2	9	0	0	2	0	1	14	1	4	33
5	40 - 44	0	10	31	1	0	3	0	0	15	2	0	63
6	45 - 49	1	11	34	0	0	5	2	0	44	2	0	99
7	50 - 54	0	9	33	1	0	3	1	0	36	2	1	86
8	55 <	0	2	16	0	0	1	1	0	25	1	3	49
	JUMLAH	1	35	133	3	0	16	4	1	147	9	8	357

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Gambar 2.4
Grafik Data PNS Berdasarkan Pendidikan dan Usia Tahun 2014

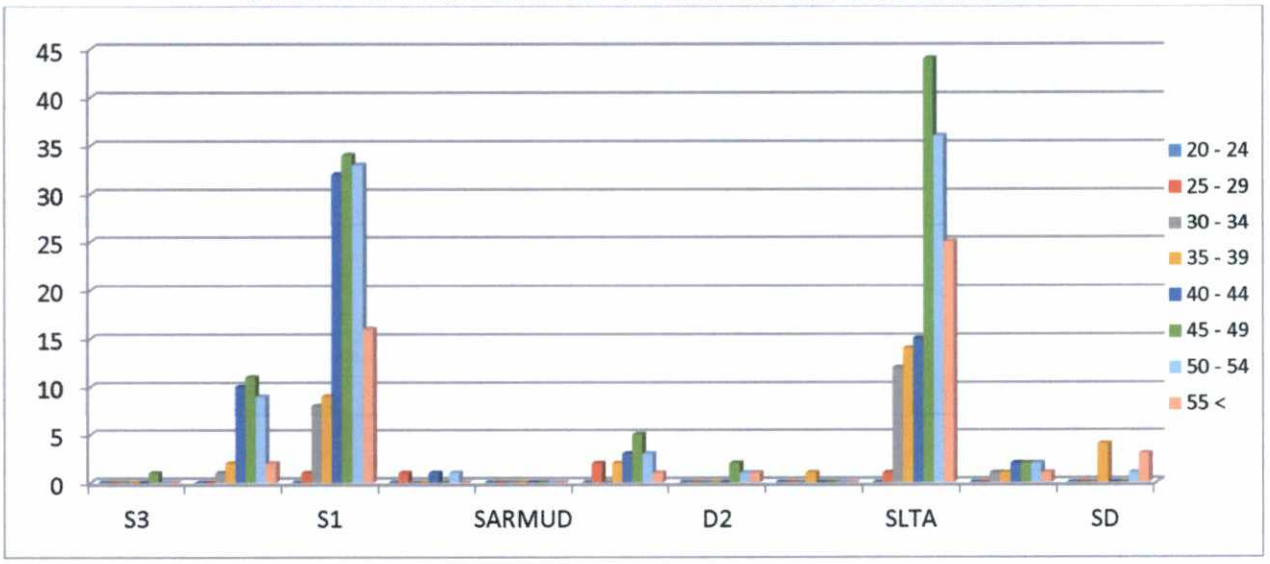

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Tabel 2.5
Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Dan Usia Tahun 2014

No.	TINGKAT USIA	GOLONGAN															JUMLAH
		IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	II/A	I/D	I/C	I/B	I/A	
1	20 - 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	25 - 29	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	5
3	30 - 34	0	0	0	0	0	6	2	0	0	12	1	0	1	0	0	22
4	35 - 39	0	0	0	0	1	2	2	2	0	21	0	0	1	4	0	33
5	40 - 44	0	0	3	9	6	18	5	1	1	18	1	0	1	0	0	63
6	45 - 49	1	1	3	10	19	39	5	3	2	14	2	0	0	0	0	99
7	50 - 54	0	2	6	13	11	40	1	1	0	9	1	0	1	1	0	86
8	55 <	0	1	2	14	2	25	1	1	0	0	2	0	1	0	0	49
	JUMLAH	**1**	**4**	**14**	**46**	**39**	**131**	**17**	**8**	**5**	**75**	**7**	**0**	**5**	**5**	**0**	**357**

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Gambar 2.6
Grafik Data PNS Berdasarkan Golongan dan Usia Tahun 2014

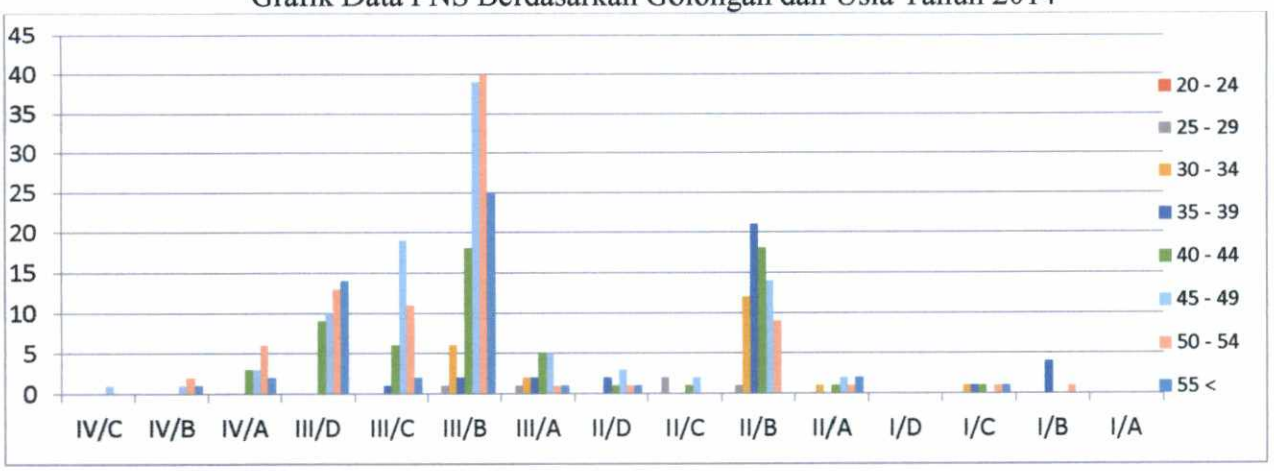

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Prosentase jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin (gender) adalah pegawai laki-laki sebanyak 85.99% atau sebanyak 307 orang sedangkan pegawai perempuan sebanyak 14,01% atau sebanyak 50 orang. Sedangkan Jumlah pegawai yang menjalani masa pension ditahun 2014 sebanyak 7 orang, pegawai yang mutasi pangkat untuk regular sebanyak 68orang, pegawai yang mutasi jabatan yang masuk 1 orang yang keluar 4 orang. Untuk pegawai yang mengikuti Diklat pada Tahun 2014 sebanyak 75 orang, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat
Tahun 2009-2014

NO.	NAMA DIKLAT							JUMLAH
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	BarangJasaPemerintah			15	12	2	2	**31**
2	PenatausahaanKeuangan				2	1	3	**6**
3	Bendahara							**0**
4	ManajemenKearsipan	1				2	2	**5**
5	PengelolaanBarang Daerah				3	3		**6**
6	Analisis Beban Kerja			1				**1**
7	TOT CalonWidyaiswaradanGratifikasi		2				2	**4**
8	Diklatpim Tk. III	1		2	1		1	**5**
9	Diklatpim Tk. IV		1	2	3	2		**8**
10	PPNS / Peningkatan PPNS	1	2	2		1	1	**7**
11	Operator JembatanTimbang (OJT)				24	20	45	**89**
12	AnalisisDampakLingkunganLalin				1	2	1	**4**
13	ManajemenFasilitas LLAJ				1	3		**4**
14	Orientasi LLAJ Tk. I							**0**
15	ManajemenRekayasaLalu Lintas							**0**
16	ManajemenTransportasiPerkotaan					1	2	**3**
17	LogistikdanPergudangan					6		**6**
18	JalurdanBangunanKeretaApi					1		**1**
19	PenyusunanJaringan LLAJ			1				**1**
20	PengujiKendaraanBermotor (PKB)				1		2	**3**
21	PKB Lanjutan/Inspeksi			2			3	**5**
22	Intelegency Transport System (ITS)					2		**2**
23	Aerodrome Flight Service (AFS)					2		**2**
24	BangunandanLandasan		1					**1**
25	Keudaraan Tk. Sarjana		1					**1**
26	KeselamatanPelayaran ASDP					4		**4**
27	ManajemenOperasional LASDP		2	2				**4**
28	Instruktur PKB						3	**3**
29	FasilitasLalu Lintas						1	**1**
30	DasarFasilitasOperasi KA						1	**1**
31	TeknisPenyusunanRegistrasidanDokumen						1	**1**
32	TeknisOperasional LLASDP						2	**2**
33	TeknisSertifikasidanRegistrasiKapal ASDP						3	**3**
34	TOT Kearsipan							**0**
35	TeknisPranataKomputer							**0**
36	KeuanganBerbasisAkrual							**0**

Sumber : Subbagian Kepegawaian dan Umum tahun 2014.

Kebutuhan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) Tahun berdasarkan hasil penyusunan proyeksi kebutuhan PNS sesuai ABK Anjab dengan dasar perhitungan jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2011 yaitu 410 orang, adapaun proyeksi kebutuhan pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2012-2016

No	Tahun	BUP	Ketersediaan	Kebutuhan		Total Kebutuhan
				Struktural	Non Struktural	
1	2012	28	382	3	135	517
2	2013	43	367	3	150	517
3	2014	64	345	6	168	517
4	2015	78	332	9	179	517
5	2016	99	311	12	197	517

Data-data kepegawaian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2008 – 2014 dan Rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 6.

Sesuai data yang ada tersebut di atas, pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, kebutuhan Diklat adalah sebagaimana tabel berikut :

NO	DIKLAT	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	DIKLAT BIDANG KETATAUSAHAAN	17	19	21	22	25	29	
2	DIKLAT BIDANG DARAT	74	87	91	100	106	112	
3	DIKLAT BIDANG LAUT	3	4	3	3	9	9	
4	DIKLAT BIDANG UDARA	13	13	16	17	17	18	
5	DIKLAT LAIN-LAIN	48	52	57	67	69	72	
	JUMLAH	155	175	188	209	226	240	

Dari data kebutuhan Diklat Bidang Darat tersebut, kebutuhan Diklat kebutuhan yang diperlukan memiliki kompetensi sebagai Penguji sebanyak 26 orang.

Hal ini diperlukan antara lain untuk pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota, dan terdapat 25 (dua puluh lima) unit pengujian kendaraan bermotor. Dari 26 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, yang belum meiliki

pengujian kendaran bermotor Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran. Jadi kebutuhan 26 orang yang memiliki kompetensi sebagai Penguji merupakan kebutuhan yang relatip sedikit untuk memenuhi tenaga penguji yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamantkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sesuai data dari Profil dan Kinerja Perhubungan Darat Direktorat LLAJ Ditjen Hubdat Kemenhub sampai akhir tahun 2013 di Provinsi Jawa Barat terdapat 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dengan sertifikat Penguji serta komposisi Jabatan Fungsional berbagai tingkatan.

Sehingga untuk meningkatkan kompetensi tersebut, baik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun di Kabupaten/Kota terdapat kekurangan tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi fungsional penguji.

Untuk itu Dinas Perhubungan telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan melakukan rekruetmen tenaga fungsional penguji dari Kabupaten/kota.

Jumlah pegawai yang telah bersertifikat kompetensi penguji sampai tahun 2014 tingkat capaian kinerja 100,35 % dari target 23,00 % realisasi 23,08 % atau sebanyak 6 orang sedangkan, sesuai yang ditargetkan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan sebanyak 26 orang kekurangan sebanyak 20 orang.

Solusi yang yang harus dilaksanakan ialah dengan Peningkatan Sumber daya Aparatur terkait melalui Pendidikan dan Pelatihan; Seminar; Lokakarya; Rapat Koordinasi/ Forum diskusi.

Melalui Bidang Bina Sistem Operasional Trasnsportasi (BSOT), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian operasional dan melalui Seksi Pengendalian Operasional Transportasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pengendalian operasional penegakan hukum. Selain itu UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengawasan dan pengendalian, penimbangan kendaraan angkutan barang dan kendaraan bermotor angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), tugas tersebut dilaksanakan antara lain melalui penegakan hukum Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dibutuhkan jumlah PPNS yang memadai dan memiliki kompetensi sebagai PPNS. Sampai dengan tahun 2014 jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PPNS sebanyak 46 orang sedangkan kebutuhan pengawai yang mengikuti diklat PPNS sebanyak 61 orang atau 75.41 %.

Untuk mencapai target dimaksud untuk tahun 2015 perlu di alokasikan anggaran melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perhubugan Provinsi Jawa Barat atau melalui usulan untuk diikutsertakan pada Diklat yang dilaksanakan oleh Bandiklatda Provinsi Jawa Barat atau Instansi lain dengan peserta diklat PPNS yang ikut serta diharapkan mencapai sebanyak 15 orang.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Penyediaan transportasi oleh negara seringkali diukur dan dilihat dari penyediaan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, jembatan, terminal, tempat henti *(shelter)* dan lain-lain. Hal ini dalam ekonomi transportasi dipandang sebagai sisi sediaan *(supply)*. Sedangkan disisi lain peningkatan jumlah kendaraan sebagai akibat dari peningkatan aktivitas masyarakat dianggap sebagai sisi permintaan *(demand)*. Perubahan permintaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, sebagai contoh pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan perjalanan.

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi yang cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang, barang di Jawa Barat diperlukan peningkatkan pelayanan transportasi. Berdasarkan data pada RKPD Jabar Tahun 2014 bahwa jumlah kendaraan baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Jawa Barat terhadap alat transportasi cenderung meningkat. Berkaitan dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pembangunan sarana jalan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang transportasi dan perhubungan kepada masyarakat.

Rasio jumlah kendaraan umum roda empat mengalami peningkatan dari rasio satu kendaraan per 355 penduduk menjadi satu kendaraan per 360 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa beban kapasitas kendaraan umum semakin meningkat, dengan kata lain bahwa perlu adanya peningkatan jumlah kendaraan umum untuk mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Lain halnya pada kendaraan bukan umum yang mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga rasionya cenderung menurun dari satu kendaraan untuk 37 penduduk menjadi satu kendaraan untuk setiap 35 penduduk. Begitu pula untuk kendaraan sepeda motor, kepemilikan penduduk Jawa Barat terhadap sepeda motor cenderung meningkat, pada tahun 2010 satu sepeda motor untuk 6 orang penduduk menjadi satu sepeda motor untuk setiap 5 orang penduduk.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penghargaan ini diberikan setiap tahun. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Dari unsur-unsur yang dinilai tersebut, dapat mendorong kompetisi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan menata transportasi publik yang baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga keikutsertaan dalam Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya yang merupakan bagian dari program/kegiatan Kementerian Perhubungan dapat mendorong tercapainya transportasi publik yang baik di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Untuk meningkatkan pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas dan pengkoordinasian perijinan trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa Barat maka peran serta dari keikutsertaan kabupaten/kota diperlukan, sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas di Jawa Barat meliputi : terlaksananya Lomba Tertib Lalu Lintas dan

Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya.

Sampai dengan tahun 2014 jumlah Kabupaten/kota yang ikut serta dalam WTN adalah sebanyak 13 dari 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat atau 48.15%.

Keikutsertaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan terus didorong dari tahun ke tahun dan program/kegiatan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang memberikan stimulus dan peran koordinatif dengan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan pasal 138 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

1. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau
2. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud;
3. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Lebih lanjut dalam pasal 139 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan :

1. Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara;
2. Pemerintah Daerah Provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota;
4. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara kondisi saat ini, angkutan umum sebagaian besar masih dimiliki/ dikelola perseorangan atau manajemen perusahaan masih bersifat kekeluargaan (konvensional), dengan ciri-ciri antara lain :

a. Bentuk perusahaan sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Perorangan;

b. Sebagian besar jabatan di perusahaan dipegang oleh anak/keluarga tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki;
c. Aset perusahaan merupakan aset keluarga;
d. Investasi terbatas;
e. Kurang mengikuti perkembangan teknologi informasi .

Kondisi tersebut mudah mengalami (a) Perusahaan terpuruk ketika pemilik/orang tua meninggal, (b)Terjadi pembagian aset perusahaan karena merupakan aset keluarga (Harta waris).

Sebagai upaya penataan angkutan jalan dalam hal ini angkutan umum antara lain adalah :

a. Mewujudkan tumbuhnya industri angkutan umum, dengan mengupayakan agar perusahaan angkutan berbadan hukum, perseroan terbatas (PT) atau koperasi;
b. Menyelenggarakan pelayanan angkutan umum yang memiliki aksesibilitas tinggi dan bersifat massal dan memiliki standar pelayanan minimal (SPM) serta standar operasional prosedur (SOP);
c. Adanya jaminan penyediaan jasa angkutan umum oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait penyelenggaraan angkutan umum (subsidi, ekonomi, non-ekonomi);
d. Menciptakan angkutan jalan yang aman, nyaman dan murah, sehingga mampu mendorong perekonomian bangsa;
e. Memberikan pelayanan angkutan jalan ke seluruh pelosok negeri, melalui penyelenggaraan angkutan jalan perintis

Upaya agar perusahaan angkutan berbadan hukum, perseroan terbatas (PT) atau koperasi tentu memerlukan kesungguhan dari semua pihak mengingat proses tersebut bukan merupakan proses sederhana dan mudah, karena saat ini ada kesalahan dalam pemahanan pelayanan transportasi, dalam hal ini pengusaha angkutan umum merasa telah memiliki ijin trayek dan dapat memperlakukan penumpang hanya untuk mendapatkan keuntungan saja, sementara kewajiban lainnya seperti wajib angkut penumpang, mengantar penumpang sesuai asal tujuan diabaikan apabila tidak menguntungkan.

Dan tentu saja menyangkut kepentingan banyak pihak baik kepentingan di jalan maupun kepentingan dari tenaga kerja yang terlibat dalam angkutan umum yang ada saat ini.

Oleh karena itu apabila Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum tercapai seratus persen, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi khususnya AKDP di Jawa Barat.

Sampai dengan tahun 2014 jumlah ijin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah sebanyak 23.184 ijin, dan yang sudah berbadan hukum sebanyak 54 ijin atau sebesar 0,23 %.

Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, teridentifikasi terjadinya ketidakkeseimbangan antara *supply* dan *demand* angkutan penumpang umum di Jawa Barat. Untuk menjamin ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 telah melaksanakan kegiatan penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan angkutan penumpang umum di Jawa Barat.

Adapun dari Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan terdapat dokumen hasil kegiatan Penyusunan Dokumen Penataan Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat yaitu untuk PKN Bandung Raya dan PKN Bodebek dan kegiatan Penyusunan Dokumen Kelembagaan Pengusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum dan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Angkutan Umum.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1532-Admrek/2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi, di Provinsi Jawa Barat terdapat 286 ruas jalan Provinsi dengan panjang 2191,290 Km.

Ruas jalan provinsi tersebutlah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk dapat disediakan Angkutan Umum untuk melayani pergerakan masyarakat. Angkutan umum yang disediakan melalui tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Kegiatan operasional pelayanan angkutan mobil penumpang umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi yang menghubungkan antar Ibukota

Kabupaten atau Kota, Ibukota Kabupaten atau Kota dengan Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan atau dengan Desa serta menghubungkan antar kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Operasional Angkutan AKDP, berdasarkan data yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan operasional angkutan mobil penumpang umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dilayani oleh sebanyak 41.408 kendaraan.

Sesuai data di Bidang Transportasi Darat, dari ruas jalan Provinsi sepanjang 2191 Km. yang belum terlayani angkutan penumpang AKDP sepanjang 454,72 Km, sehingga prosestase jalan yang belum terlayani AKDP adalah 20,75%. Dengan demikian Prosentase jalan yang sudah terlayani AKDP adalah 79,25%.

Dari ruas jalan Provinsi sepanjang 2.191 Km tersebut, dibutuhkan 47.003 kendaraan angkutan umum AKDP, dan telah tersedia sebanyak 41.408 kendaraan atau 88,10%. Namun pelayanan Angkutan penumpang di Provinsi Jawa Barat dari semua jenis harus terus ditingkatkan dari sisi kualitas pelayanan, sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan umum semakin tinggi. Hal ini merupakan tantangan seluruh insan Perhubungan di Jawa Barat.

Peranan Jembatan Timbang dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan sangatlah strategis terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009/LLAJ pasal 169 ayat (1) mengenai ketentuan angkutan barang tentang tata cara pemuatan, Daya Angkut, Dimensi Kendaraan dan Kelas Jalan dengan tujuan angkutan barang aman lancar dan terkendali sesuai pasal 3(a) UU nomor 22 Tahun 2009 LLAJ.

Dalam intensitas pengguna jalan oleh kendaraan yang sarat muatan sangat tinggi pada setiap ruas jalan, akibat muatan lebih tersebut menimbulkan dampak menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas atau menurunnya *Level Of Servis (LOS)* suatu jalan sehingga dapat terjadi dampak ikutannya yaitu meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Pentingnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku agar angkutan jalan lancar, selamat, tertib, terwujudnya etika budaya dan serta kepastian hukum bagi masyarakat maka Sub Unit PPKB Provinsi Jawa Barat atau biasa disebut Jembatan Timbang, melaksanakan :

- Penindakan kelebihan muatan melalui proses penindakan sangsi BAP3L (tilang) yang ditetapkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Pengembalian kendaraan serta memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap pengemudi kendaraan yang melanggar;
- Secara insidentil dilaksanakan operasi gabungan kendaraan angkutan umum bersama unsur Dishub Kota/Kabupaten POLRI dan TNI.

Di Jawa Barat terdapat 8 (delapan) Jembatan timbang yang masih beroperasi, 4 (emapat) Jembatan Timbang terdapat di wilayah kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta dan 4 (empat) Jemabatan Timbang di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan. Dari data di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat ditampilkan pada tabel sebnagai berikut :

SUB UNIT PPKB	2012			2013		
	PELANGGARAN	TIDAK MELANGGAR	JUMLAH KENDARAAN	PELANGGARAN	TIDAK MELANGGAR	JUMLAH KENDARAAN
BALONGGANDU	78.447	98.605	177.052	115.633	95.564	211.197
KEMANG	11.395	64.619	76.014	8.304	52.650	60.954
BOJONG	7.920	61.992	69.912	3.794	41.734	45.537
CIBARAGALAN	56.985	39.949	96.934	49.831	32.234	82.065
TOMO	16.610	129.835	146.445	49.845	75.954	125.799
GENTONG	16.536	70.227	86.763	31.167	269.293	300.460
SINDANGRASA	12.014	67.486	79.500	61.808	401.228	462.536
LOSARANG	21.944	292.572	314.734	27.998	96.578	124.576
Jumlah	**221.851**	**825.285**	**1.047.354**	**348.380**	**1.065.235**	**1.413.124**

Sesuai dengan data yang tersedia, sampai dengan tahun 2014, jumlah kendaraan yang melewati jembatan timbang s.d bulan Desember 2014 sebanyak 1,198.481 unit, yang melanggar sebanyak 283.820 unit dan kendaraan yang tidak melanggar sebanyak 914.661 unit atau 76,32% .

Fungsi dan tugas Jembatan Timbang harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga kendaraan angkutan barang yang tidak melanggar makin meningkat, dan kendaraan yang melanggar semakin turun.

Adapun usaha-usaha untuk Peningkatan Pelayanan Angkutan umum laik Jalan di Jawa Barat antara lain:

- Pengendalian dan pengawasan tanda pengesahan bagi armada umum AKDP di Jawa Barat, yaitu dengan Pendaftaran ulang 42.500 armada angkutan umum AKDP dan izin Angkutan laut sebanyak 329 kapal pedalaman dan angkutan udara sebanyak 15 perusahaan di Jawa Barat.
- Jumlah kendaraan wajib uji ada 420.752 unit kendaraan, setiap tahun setiap kendaraan wajib melakukan uji berkala sebanayk 2 kali, sehingga target kendaraan yang diuji sebanyak 841.504 unit kendaraan, sedangkan yang melakukan uji berkala kendaraan di kabupaten/kota se-Jawa Barat ada sebanyak 604.163 unit kendaraan atau 71,8% dari target 100% atau tercapai 71,80 %

Prosesntase kendaraan yang melakukan uji berkala tersebut sebesar 71,80%, mengingat kendaraan yang terdata di Jawa Barat yang wajib uji berkala tersebut, dapat melakukan uji berkala di tempat pengujian kendaraan bermotor di tempat lain, yang biasa disebut numpang uji. Provinsi Jawa Barat berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga kemungkinan besar sebagian besar melakukan uji berkala ke tempat pengujian terdekat. Ada pula yang karena telah jatuh tempo atau habis masa uji berkalanya, namun sedang melakukan perjalanan, sebagai contoh kendaraan angkutan barang, dapat juga melakukan uji berkala di tempat terdekat tujuan pergerakan kendaraan tersebut. Atau kendaraan melakukan pengujian di laur Provinsi dan atau mutasi le luar Provinsi tetapi tidak melapor.

Selain itu sebagaimana diketahui, sedang marak kasus pemalsuan buku uji, berdasarkan hasil pengawasan di Jalan, Jembatan Timbang dan Terminal.

Dengan demikian walaupun jumlah kendaraan yang wajib uji dan melakukan uji berkala sebanyak 71,80%, tetapi kendaraan yang beroperasi di jalan harus dalam kondisi laik jalan.

Pembangunan prasarana transportasi merupakan sebagian dari pembangunan Infrastruktur tranportasi. Prasarana trnasportasi di Jawa Barat baik Darat, Laut dan Udara masih relatip kurang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan transportasi, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terus mendorong

untuk meningkatkan prasarana transportasi yang tersedia di Jawa Barat untuk mendukung pelayanan transportasi yang efisien.

Pelayanan transportasi udara di Provinsi Jawa Barat masih memerlukan dukungan investasi pemerintah dan swasta yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi udara internasional dan domestik maupun kargo.

Prasarana dan sarana bandar udara yang ada saat ini belum memadai untuk mengakomodir pergerakan orang dan barang melalui transportasi udara, baik domestik maupun internasional; Masih diperlukan dukungan investasi dari pemerintah dan swasta dalam mewujudkan bandara internasional di Jawa Barat;

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan pembangunan Bandara Internasional Kertajati Majalengaka di dukung Kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2005-2015 yang secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembanan (WP) Utama dengan salah satu yaitu Wilayah Pengembangan (WP) Utara fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Dengan terealisasinya Pembebasan lahan BIJB sebagai penyediaan sarana prasarana Pelabuhan Udara di Jawa Barat yang representatif diharapkan dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat penggunan jasa angkutan moda udara

Adapun Prosentase ketersediaan transportasi udara (Pembangungan BIJB Kertajati dan pengembangan bandara Nusawiru) sebesar 11,09%. Capain ini dirasakan masih jauh dari rencana mewujudakan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka dan Pengembangan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran.

Upaya pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat terus dilakukan dan didorong berbagai pihak, mengingat Perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding transportasi jalan antara lain: kapasitas angkut besar

(massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit. Dengan semakin kuatnya isu lingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian.

Dengan semakin bertambahnya kebutuhan perjalanan akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sementara pembangunan transportasi berbasis jalan terkendala pengembangan lahan, maka menimbulkan eskalasi persoalan transportasi jalan. Moda kereta api dapat menjadi solusi dan menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Pembangunan perkeretaapian Provinsi yang handal dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerlukan suatu tatanan dan pedoman dalam pembangunan perkeretaapian Provinsi. Hal ini dapat terwujud melalui penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Tujuan penyelenggaraan perkeretaapian adalah untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan. Guna menunjang mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan visi pembangunan transportasi wilayah Jawa Barat adalah Jaringan transportasi wilayah bertumbuh,

merata, dan terpadu, dengan misi pembangunan transportasi wilayah Jawa Barat dalam rangka mewujudkan visi adalah meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah dan meningkatkan jaringan prasarana transportasi wilayah.

Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar-kota dimaksudkan untuk mengurangi beban angkutan orang di jalan. Dengan daya angkut yang besar, kereta api antar kota dapat menjadi moda transportasi utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan Nasional di Jawa Barat.

Sasaran dari strategi ini adalah mewujudkan jaringan dan layanan perkeretaapian yang mampu meningkatkan pangsa pasar angkutan kereta api. Strategi pengembangan jaringan tersebut harus mampu mengakomodir kebutuhan layanan angkutan penumpang dan barang di Jawa Barat.

Pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian antarkota di Provinsi Jawa Barat yang direncanakan sesuai rencana induk perkeretaapian di Jawa Barat terdiri dari:

a. Peningkatan jalur KA lintas Bandung – Sukabumi – Bogor.
b. Revitalisasi jalur KA Bandung – Soreang dan Rancaekek – Jatinangor.
c. Elektrifikasi jalur KA Cicalengka – Bandung – Padalarang.
d. Pengembangan jalur KA Cirebon – Kertajati untuk mendukung akses ke Bandar Udara Internasional Jawa Barat.
e. Pengembangan jalur KA Tanjungsari – Kertajati untuk mendukung akses ke Bandar Udara Internasional Jawa Barat.
f. Revitalisasi jaringan lintas yang sudah tidak dioperasikan (Bandung – Soreang – Ciwidey, Rancaekek – Tanjungsari, Banjar – Cijulang).
g. Peningkatan jaringan prasarana jalan rel untuk mendukung pengembangan pelabuhan darat (Dry Port) di Gedebage dan Cikampek.
h. Pengembangan jaringan prasarana jalan rel untuk mendukung pengembangan pelabuhan Cilamaya.

Pengembangan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota di provinsi Jawa Barat yang direncanakan sesuai rencana induk perkeretaapian di Jawa Barat terdiri dari :

a. Pengembangan pelayanan kereta api barang antar stasiun di Karawang dengan Pelabuhan Cilamaya.
b. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Padalarang – Cicalengka.
c. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Rancaekek – Tanjungsari
d. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Tanjungsari – Kertajati – Cirebon.
e. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Padalarang – Cianjur – Sukabumi – Bogor.
f. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Bandung – Ciwidey.
g. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Cirebon – Kadipaten – Kertajati.
h. Pengembangan pelayanan kereta api penumpang antara Tasikmalaya – Cijulang – Pangandaran.
i Pengembangan pelayanan kereta api barang antara Bandung – Pelabuhan Cirebon.
j. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Pelabuhan Cirebon melalui shortcut Cibungur – Tanjungrasa.
k. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Tasikmalaya – Pangandaran.
l. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Bandung – Padalarang – Cianjur – Sukabumi – Bogor.
m. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Dry Port Gedebage Bandung – Pelabuhan Cimalaya.
n. Pengembangan pelayanan kereta api angkutan barang antara Dry Port Cikarang – Pelabuhan Cilamaya

Melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan antara lain kegiatan fasilitas pembangunan *Shortcut* Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa, Penyusunan Rencana DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap I), Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek – Tanjungsari, Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat dan Sampai dengan tahun 2014, kondisi jaringan/panjang jalan rel eksisting di Provinsi Jawa Barat adalah 1.363,88 km, dari jaringan/panjang rel tersebut yang beroperasi adalah 993,29 km dan yang tidak beroperasi 370,61 km.

Provinsi Jawa Barat memeiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta dengan kondisi geografis yang banyak gunung, lembah dan juga masih banyak daerah terpencil dan terisolir. Daerah terisolir di Jawa Barat ada yang dipisahkan oleh Danau atau Sungai. Daerah-daerah yang terisolir tersebut perlu juga mendapat layanan jasa transportasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu layanan jasa transportasi tersebut adalah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Layanan transportasi ASDP memerlukan dermaga/pelabuhan sebagai simpul untuk naik dan turun penumpang/barang. Mengingat kondisi tersebut, perlu ketersediaan dermaga/pelabuhan di Jawa Barat untuk melayanai masyarakat terhadap layanan transportasi ASDP

Dengan prasana ASDP antara lain dermaga diharapkan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) depat beroperasi dengan lancar terpadu, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Jawa Barat dan Meningkatkan Pelayanan keamanan dan keselamatan transportasi serta mengurangi kecelakaan transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan di Jawa Barat. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) di Jawa Barat , dua tahun terakhir telah diupayakan melalui pemenuhan standar sarana prasarna di pelabuhan penyeberangan Kalipucang, Majingklak, dan Muara Gembong serta di Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur melalui APBD provinsi.

Tahun anggaran 2014 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp.843.270.700, atau 84,33% dan fisik 100%.Output kegiatan adalah Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Pos Pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur, Pembangunan KM/WC Umum di Tanggul Usman Waduk Jatiluhur, Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Area Parkir dan Pos Pengawasan di Sukasari Waduk Jatiluhur dan Pembuatan Garasi Speed Boat di LLASD Jatiluhur. Outcome kegiatan adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat.

Jumlah dermaga yang ada saat ini sebanyak 18 dermaga sedangkan kebutuhan dermaga ASDP di Jawa Barat sebanyak 33 dermaga.
Dengan demikian prosesntase ketersediaan dermaga/pelabuhan di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2014 mencapai 54,55 % .

Sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020 yang telah dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Keselamatan Jalan dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama.

Dalam melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi 5 (lima) Pilar yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, Jalan yang Berkeselamatan, Kendaraan yang Berkeselamatan, Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, dan Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan Pilar Kedua : Jalan Yang Berkeselamatan adalah dengan program Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat yaitu dengan meningkatkan pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan dan Panerangan Jalan Umum (PJU) serta mendorong Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk memenuhi Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jalan Lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/ kota berupa pemenuhan fasilitas lalu lintas jalan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, Seksi Rekayasa dan Keselamatan Bidang Transportasi Darat pada Tahun 2014 telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat fisik yaitu pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di jalan Provinsi di Jawa Barat.

Sesuai data yang ada, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi adalah sebagaimna tabel berikut :

NO	Tahun	Nama Fasilitas Lalu Lintas			
		Marka (M2)	Rambu (Unit)	Guard rail (unit)	PJU (unit)
1	2012	1.405.550	3.808	20.877	214
2	2013	1.584.575	6.098	21.047	576
3	2014	1.672.575	6.685	21.207	989

Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan adalah meningkatnya kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas dengan terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat, berupa pemasangan Rambu Lalu lintas Uk. 60 X 60 cm, PJU Solar Cell sebanyak, Pagar Pengaman Jalan, marka jalan dan Laporan Hasil Updating dan inventarisasi/kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan, laporan updating data tingkat pelayanan jalan provinsi dan laporan updating data rawan kecelakaan lalu lintas, maka peningkatan fasilitas lalu lintas di jalan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan dan dalam sosialisasi dan pendidikan masyarakat untuk menuju tertib lalu lintas.

Berdarakan data sampai dengan tahun 2014, prosentase ketersediaan fasiltas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi Jawa Barat mencapai 11,02 %.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambaran kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Lampiran 1 – formulir S-1) serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (lampiran 2 - Formulir S-2).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan

transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalulintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk; yang mana kemacetan lalulintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh , kemacetan lalulintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di daerah sepanjang jalan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi oleh angkutan bis dan Angkot masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (*mass rapid transit*) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak-desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasi masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu.

Sampai saat ini baru golongan masyarakat tingkat menengah ke bawah yang menggunakan jasa angkutan umum. Angkutan umum masih kurang menarik, karena masih terdapat kekurangan-kekurangannya, terutama dari segi:

1. kenyamanan
2. keamanan
3. kecepatan
4. ketepatan
5. kemudahan
6. frekuensi dan jadwal keberangkatan
7. fasilitas di terminal dan halte

Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tantangan yang dihadapi sektor perhubungan sangat besar dan komprehensif, utamanya disebabkan oleh terjadinya defisit infrastrutur dan jasa pelayanan transportasi di semua lini: jaringan jalan, kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Semua fasilitas transportasi berada dalam tekanan besar yang muncul akibat kenaikan permintaan perjalanan yang sangat tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, kependudukan, urbanisasi, kelangkaan energi, lingkungan, keterbatasan lahan, dan keterbatasan pembiayaan.

Tantangan besar lainnya adalah terjadinya kesenjangan (gap) yang besar antar wilayah dalam sistem pasokan transpoftasi dan pelayanannya. Gap transpoftasi merupakan salah satu faktor utama terjadinya kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menyebabkan biaya ekonomi sangat tinggi di kawasan Indonesia bagian timur, khususnya Papua, yang sangat sedikit sekali memiliki aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

A. Transportasi Darat

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi darat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi
3. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
4. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

5. Rendahnya mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat :
   a. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
   b. Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
   c. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
   d. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
   e. Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistemterminal.

f. Terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;

g. Belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transporasi darat, khususnya :
   - Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah,
   - Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah,
   - Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan,
   - Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan

h. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan;

i. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi;

j. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

B. Transportasi Laut dan ASDP

Tantangan dan masalah utama subsektor transportasi laut adalah Kewenangan Bidang Transportasi Laut sekarang ini adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transpotasi laut di daerah, namun demikian keberadaan

Pelabuhan Utama (Tanjung Priok) sekarang ini sebagai tujuan eksport import, dari dan ke Provinsi Jawa Barat sekarang ini mengalami kongesti, akibat terbatasnya kapasitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan pengembangan untuk membangun Pelabuhan Baru yaitu Pelabuhan Cilamaya dan saat ini telah masuk kedalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan RTRW serta RPJMD Provinsi Jawa Barat, dimana pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara merupakan integrasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan wilayah (PKW), sehingga infrastruktur strategis (Pelabuhan Cilamaya) diperlukan untuk pengembangan potensi Jawa Barat khususnya dan Nasional pada umumnya.

- Tantangan dan masalah utama subsektor transportasi laut
  1) Belum berkembangnya transportasi laut yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang, baik regional, nasional, maupun internasional. Oleh sebab itu perlunya dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan pelabuhan laut baik regional maupun internasional.
  2) Belum tersedianya pelabuhan yang dapat memenuhi tantangan seiring berkembangnya peningkatan kebutuhan barang ekport/import dari dan ke wilayah Bawa Barat diantaranya adalah Pelabuhan Samudera, Pelabuhan Cilamaya dan Peningkatan Pelabuhan Cirebon
- Tantangan dan masalah utama subsektor transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)
  1) Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan ASDP di (3) tiga waduk yaitu (Saguling,Cirata dan Jatiluhur), dan (3) tiga penyeberangan yaitu (Kalipucang, Majingklak dan Muara Gembong),
  2) Pemanfaatan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk kebutuhan transportasi rakyat lokal menurun, dengan adanya pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan dewasa ini, sehingga jalan dan jembatan yang belum terbangun saja yang masih dilayani dan pengguna fanatik SDP.
  3) Masih rendah dan kurangnya pemanfaatan potensi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah.

4) Masih kurangnya keterpaduan pembanguan jaringan trasnportasi ASDP dengan rencana pengembangan wilayah baik secara Regional maupun Nasional terkait sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi.

C. Transportasi Perkeretaapian

Untuk jangka waktu yang masih lama kedepan, moda transportasi jalan masih tetap akan befungsi sebagai tulang punggung dan mendominasi pergerakan orang dan barang di Indonesia. Untuk mengurangi beban jaringan jalan, UU 23/2007 memerintahkan untuk mengoptimalkan peran moda kereta api. Selain mendorong migrasi dari monopoli negara kepada pembukaan pasar perkeretaapian nasional, UU 23/2007 juga memberikan tugas kepada pemerintah untuk membuat Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) yang telah selesai diwujudkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 43/2012. RIPNAS memproyeksikan bahwa sampai Tahun 2030 di Indonesia akan terbangun sepanjang 12.000 km jalur KA (railway track) yang terdiri dari 6.800 km jaringan di Jawa, 2.900 km di Sumatera, 1.400 km Kalimantan, 500 km di Sulawesi, dan 500 km di Papua.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan penyelenggaraan perkeretaapian antara lain yaitu:

1) Lemahnya keberpihakan negara pada sektor kereta api, berimplikasi pada penganggaran dan kebijakan industri otomotif;
2) Persaingan antar moda baik dengan moda angkutan umum jalan, pesawat dan kendaraan bermotor pribadi yang semakin terjangkau;
3) Tingginya investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api menyebabkan pihak swasta dan pemerintah daerah belum ada yang serius, mampu dan berani membuka layanan kereta api dalam daerah selain PT. KAI;
4) Pembenahan/penertiban asset jalur kereta api di daerah sebagai upaya reaktivasi.
5) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

D. Transportasi Udara

Indonesia berada dalam trayektori mobilitas angkutan udara global dan saat ini dalam posisi sekitar 0,2-0,3 perjalanan-udara per kapita. Untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan perjalanan udara diperlukan upaya besar untuk mengembangkan infrastruKur bandar udara sebagai simpul penentu kapasitas layanan transpoftasi udara. Untuk itu, Tatanan Kebandarudaraan Nasional (TKN) diresmikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69/2013.Tatanan tersebut merefleksikan perencanaan sistem kebandarudaraan dengan mempertimbangkan tata ruang wilayah, keunggulan komparatif wilayah, kondisi geografi, dan aspek keselamatan. Muatan pokok dari TKN tersebut terdiri dari (1) peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; serta (2) Rencana Induk Nasional Bandar Udara (RINBU). Dalam Lampiran PM 69.2013 tersebut disampaikan penetapan hirarki dan klasifikasi bandar udara yang ada di Indonesia, serta rencana pengembangannya s.d Tahun 2030. Namun belum ada indikasi kebutuhan maupun skema/strategi pembiayaan untuk mengembangkan bandara-bandara tersebut sesuai arahan dalam TKN.

Permasalahan dan tantangan dalam pelayanan transportasi udara pada umumnya, masih terbatasnya sarana dan prasarana jasa transportasi udara dan masih memerlukan dukungan investasi pemerintah dan swasta yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi udara internasional dan domestik maupun kargo. Permasalahan dan tantangan tersebut juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km, semenjak Banten menjadi Provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Barat, Jawa Barat hanya dilayani oleh Bandara Husein Sastranegara, Bandara Nusawiru Pangandaran dan Bandara Cakrabhuwana Cirebon. Pemanfaatan ketiga Bandara tersebut masih sangat terbatas untuk pelayanan penumpang, bagasi dan cargo. Bandara Husein Sastranegara menempati area lahan 145 hektar dengan luas terminal 2.411,85 m2 serta melayani penerbangan domestik dan internasional yang dioperasikan oleh

empat maskapai penerbangan yaitu Citylink (Denpasar). Garuda (Surabaya, Denpasar), Lion Airlines (Surabaya, Denpasar, Medan,Pekan Baru, Yogyakarta, Banjarmasin), Sriwijaya Airlines (Surabaya) serta Air Asia (Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Kuala Lumpur, Singapura). Bandara Cakrabuwana saat ini hanya dijadikan sebagai bandara pengumpan dan tempat latihan penerbangan (*flying school*) sedangkan Bandara Nusawiru saat ini melayani penerbangan dari Pangandaran ke Bandung, Jakarta, dan Cilacap yang dioperasikan oleh Susi Air.

Guna mengantisipasi pertumbuhan permintaan perjalanan udara di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat dan melayani jasa transportasi udara masyarakat Jawa Barat yang selama ini menggunakan Bandara Soekarno Hatta, maka Provinsi Jawa Barat membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka dan mengembangkan Bandara Nusawiru Pengandaran.

Rencana Induk Bandara Nusawiru telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 407 Tahun 2014 dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat bahwa Bandara Nusawiru sebagai bagian dari Pusat Pertumbuhan Pangandaran akan dikembangkan.

Sebagaimana Rencana Pengembangan Bandara Nusawiru, Rencana Pembangunan Bandar Udara Kertajati dibangun dengan didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandara di Jawa Barat (diubah menjadi KP 457 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Sebagai Pengganti KM 34 tahun 2005 ttg Penetapan Lokasi Bandara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat), serta Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 5 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan rencana induk, Bandar udara yang dibangun diatas lahan seluas ±1.800 Ha ini nantinya akan dilengkapi dengan 2 (dua) buah runway berukuran 3.500 x 60 meter dan 3.000 x 60 meter yang mampu menampung pesawat sekelas Boeing 747 atau Boeing 777. Dan sesuai Mou yang telah ditandatangani, Bandara Internasional Jawa Barat akan diwujudkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan yang akan

berkomitmen menyelesaikan Pembangunan Sisi Udara dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menyelesaikan Pembangunan Sisi Darat melalui BUMD PT. BIJB.

Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan jasa transportasi khususnya transportasi udara di Jawa Barat lebih efisien, akuntabel, kompetitif dan profesional.

Guna meningkatkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi udara perlu diatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang selama ini ada. Permasalahan tersebut di antaranya meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta penegakan hukum.

E. Sumber Daya Manusia

Tantangan dan peluangan pengembangan sumber daya manusia perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
2) Belum tersusunnya Rencana Umum Pengembangan SDM Aparatur;
3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur sesuai dengan perkembangan sektor transportasi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008–2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Hingga akhir periode tahun 2013, permasalahan dalam sistem transportasi yang sudah terbilang kompleks belum dapat terurai secara menyeluruh dan mendasar. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sejauh itu, isu-isu yang berkembang sampai dengan periode tahun 2013 pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal , konversi bahan bakar fosil ke gas dan *intelegensia transport management.* Dalam hal manufaktur, pada level nasional, isu yang terus didiskusikan adalah sejauh mana industri manufaktur nasional bisa memproduksi mesin-mesin yang berstandar *euro-2* dengan tingkat emisi yang relatif rendah yang terkait dengan keinginan dan rencana Pemerintah Indonesia menurunkan tingkat emisi sebesar 26% atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Di Eropa, standar mesin-mesin yang digunakan untuk sarana transportasi sudah berstandar *euro-5.*

Harus disadari oleh semua pihak bahwa adanya akan proses perubahan besar di lingkungan strategis global yaitu ekonomi dunia secara perlahan namun pasti akan merubah dirinya dari ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur dan teknologi *hard-core* menjadi ekonomi baru yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, *soft-core*, dan teknologi informasi. Saat ini menyaksikan sebuah revolusi baru yang senyap namun niscaya di bidang telekomunikasi, informasi, dan teknologi transportasi yang membentuk kembali *landscape* perekonomian kita dan membawa

ekonomi global ke dalam dunia tanpa batas. Transformasi ekonomi saat ini ke ekonomi baru telah berjalan dalam transisi yang rapih, konsisten, dan halus. Namun prinsip-prinsip dan karakteristik dari ekonomi baru telah secara bertahap diadopsi oleh proses produksi dan industri manufaktur serta oleh semua sektor ekonomi dan juga industri infrastruktur transportasi, teknologi , dan jasa.

Didalam ekonomi berbasiskan ilmu pengetahuan, informasi dalam jumlah sangat besar dapat diakses dan didapatkan melalui jaringan internet dalam waktu yang sangat cepat dan bersifat sangat segera (*real time)* sehingga kesegeraan dan *real time delivery* menjadi kunci dari setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi global yang baru ini dicirikan oleh persaingan yang ketat untuk menciptakan inovasi produk atau pelayanan. Namun demikian walaupun perdagangan dan transaksi akan banyak diselenggarakan melalui jaringan global, peran infrastruktur transportasi tetap penting. Transportasi, telekomunikasi dan informasi, akan memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pergerakan ekonomi global. Revolusi teknologi transportasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan, komputer, dan teknologi informasi akan merubah pola dan karakteristik mobilitas orang dan barang. Kombinasi teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi akan menjadi kekuatan penentu dalam daya saing perekonomian global suatu bangsa. Transportasi yang tetap terpuruk dalam tradisionalisme dan keterbelakangan pelayanannya bukan hanya tidak dapat menopang daya saing suatu bangsa bahkan akan menjadi penghalang bagi bangkitnya perekonomian bangsa tersebut.

Salah satu implementasi yang sudah berjalan dan mempunyai prospek besar adalah *Intelligent Transport System* (ITS) dimana peran teknologi informasi berbasis satelit berbaur dengan teknologi transportasi berupa *Vehicle Information* and *Communication System* (VICS) yang mampu mengelola pergerakan kendaraan di jalan raya menjadi lebih efisien dan lebih hemat energi.

Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang nampaknya dapat menghentikan proses global tersebut. Kita dapat saja menafikan kekuatan perubahan yang dibawa oleh sistem global dari pergerakan informasi terhadap tatanan sosial ekonomi suatu negara. Akan tetapi fakta yang ada berbicara banyak tentang kehadirannya yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam sektor transportasi di Indonesia umumnya dan pada khusunya di Provinsi Jawa Barat.

Kondisi infrastruktur transportasi Indonesia secara umum saat ini masih jauh dari ideal yang dapat mendukung perubahan besar tersebut. Infrastruktur transportasi ke depan harus dibangun dengan cepat, masif, dan radikal untuk mengatasi defisit, gap, *bottlenecking*, dan *total gridlock*. Untuk itu Investasi pemerintah harus ditingkatkan secara signifikan dan dibelanjakan untuk prioritas tinggi proyek-proyek strategis yang dapat segera memperkecil defisit dan mengurangi kesenjangan transportasi. Investasi swasta harus difasilitasi sebaik-baiknya sebagai mitra kerja pembangunan yang sangat potensial mempercepat terbangunnya proyek-proyek infrastruktur, termasuk transportasi.

Persoalan daya saing, baik global maupun regional juga telah menjadi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa dalam persaingan gobal dan regional, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah rencana Perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mempunyai visi untuk membangun Komunitas ASEAN 2015 dan salah satu misinya adalah membangun Konektivitas ASEAN yang dapat menjamin komunitas ASEAN lebih kompettitif dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan ekonomi global. Membangun konektivitas diantara negara-negara ASEAN dipercaya dapat meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan, investasi, pariwisata, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya. Diantara kesepakatan yang digariskan adalah perlunya Master Plan *of* ASEAN *Connectivity* (MPAC) yang berisi identifikasi dari beberapa proyek-proyek transportasi yang menjadi prioritas untuk dibangun termasuk ASEAN Highway Network, Melaka-Pekanbaru Interconnection, West Kalimantan-Sarawak Interconnection, dan studi RoRo dan *shortsea shipping*.

Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari komunitias global juga telah menyadari akan perkembangan situasi lingkungan strategis tersebut, kesadaran tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 yang tercermin dalam Misi Pertama yaitu *Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.* Infrastruktur masuk dalam salah satu pilar yang utama dalam peningkatan daya saing global, maka Instrastruktur transportasi juga menjadi pilar yang utama dalam meningkatkan daya saing suatu wilayah.

Sesungguhnyalah tantangan yang dihadapi sektor perhubungan sangat besar dan komprehensif. Ini utamanya disebabkan oleh terjadinya defisit infrastruktur dan

jasa pelayanan transportasi di semua lini: jaringan jalan, kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Semua fasilitas transportasi berada dalam tekanan besar yang muncul akibat kenaikan permintaan perjalanan yang sangat tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, kependudukan, urbanisasi, kelangkaan energi, lingkungan, keterbatasan lahan, dan keterbatasan pembiayaan. Semua tekanan ini seakan-akan menafikan kemajuan yang sudah dicapai selama ini. Hal ini juga terjadi di semua wilayah termasuk Jawa Barat. Tantangan besar lainnya adalah terjadinya kesenjangan (*gap)* yang besar antar wilayah dalam sistem pasokan transportasi dan pelayanannya. Gap transportasi merupakan salah satu faktor utama terjadinya kesenjangan ekonomi antar wilayah dan menyebabkan biaya ekonomi sangat tinggi.

Namun permasalahan utama bidang perhubungan di Jawa Barat adalah (1) belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda; (2) kurangnya fasilitas lalu lintas jalan dan tingginya kelebihan muatan angkutan barang; (3) belum memadainya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional; (4) belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. Permasalahan-permasalahan di bidang perhubungan dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

1) Transportasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum; belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan; rendahnya disiplin pengguna jalan; belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin; belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas; rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi; masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah; perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor; masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat; masih belum berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi, belum optimalnya pembangunan transportasi umum massal di Perkotaan.

2) Transportasi udara, antara lain: Prasarana dan sarana bandar udara yang ada saat ini belum memadai untuk mengakomodir pergerakan orang dan barang melalui transportasi udara, baik domestik maupun internasional; Masih diperlukan dukungan investasi dari pemerintah dan swasta dalam mewujudkan bandara internasional di Jawa Barat; Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi udara;

3) Transportasi laut, antara lain: Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi seluruh *stakeholders* dalam rencana pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat, sebagai pengganti rencana pembangunan pelabuhan laut di Cilamaya; Belum sepenuhnya kewenangan bidang transportasi laut diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; Belum berkembangnya badan usaha yang dapat mengelola pelabuhan di Jawa Barat; Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional yang dikelola oleh Jawa Barat, sehingga prasarana dan sarana transportasi laut dan ASDP yang ada saat ini belum mengakomodir pergerakan orang dan barang, baik domestik maupun internasional; Belum optimalnya pemanfaatan potensi sungai danau dan penyeberangan untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah; Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi laut dan ASDP.

4) Transportasi Perkeretaapian : Pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian. Namun permasalahan pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat antara lain Lemahnya keberpihakan negara pada sektor kereta api, berimplikasi pada penganggaran dan kebijakan industri otomotif; Tingginya investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api menyebabkan pihak swasta dan pemerintah daerah belum ada yang serius, mampu dan berani

membuka layanan kereta api dalam daerah selain PT. KAI; Belum optimalnya Pembenahan/penertiban asset jalur kereta api di daerah termasuk di Jawa Barat sebagai upaya reaktivasi; Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu, pada saat ini belum ada keterpaduan penyelenggaraan antara transportasi darat, laut dan udara, dan perkeretapaian yang dituangkan dalam pola makro perencanaan sistem transportasi di Jawa Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara transportasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat.Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013-2018 yaitu:

"***Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua***"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahirdan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan olehseluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, ***Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, ***Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaituPemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalampelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasisIPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) danpemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) serta menerapkan model manajemenpemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kotadengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, ***Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan***. Hal ini untuk menciptakan sosok JawaBarat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukungdan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai,

serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, ***Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.*** Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatanyang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan,meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya senidan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Dari kelima misi tersebut bidang Perhubungan mengemban tugas pada Misi Keempat ***Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.*** Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan salah satu tujuan penyelenggaraan perhubungan adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat peningkatan daya saing juga merupakan yang harus diwujudkan dalam menghadapi tantangan global maupun regional, dan infrastruktur transportasi merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, maka pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi di Jawa Barat menjadi bagian yang menjadi tugas yang diemban Dinas Perhubungan.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap

misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat
Visi: "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan sosok manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, berdaya saing tinggi, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3. Meningktanya kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia; 4. Mengokohkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial
Misi Kedua, Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomiyang berkualitas danmengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.	1. Meningkatkan birokrasi yang partisipatif,professional danakuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Terwujudnya pemerintahan yang modern 3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten 4. Meningkatkan stabilitas di daerah	1. Meningkatnya kualitas danakuntabilitas layananPemerintahan 2. Meningkatnya kualitas tata kelolaPemerintahan berbasis IPTEK 3. Meningkatnya profesionalismedan kualitas kehidupan aparatur 4. Meningkatnya stabilitas trantibum,kesadaran politik dan hukum

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan.	1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar;	1. Meningkatnya daya dukung dan daya tamping lingkungan serta kualitas penanganan bencana 2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis
Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal	1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdayasaing serta meningkatnya prestasi olehraga; 3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan pariwisata yangberdayasaing; 4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia	1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu 3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata 4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukan oleh indikator – indikator kinerja misi dengan target – target terukur. Kinerja misi disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018. Bidang Perhubungan sebagai urusan wajib termasuk pada indikator aspek pelayanan umum (APU), dan juga terkait peningkatan daya saing di Jawa Barat, indikator hasil penyempurnaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
(Hasil Penyempurnaan)

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2013	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/ kota dalam WTN	*persen*	23,08	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum	*persen*	0,17	0,22	25,17	50,12	75,06	100
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	*persen*	*NA*	88	91	94	97	100
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di JembatanTimbang	*persen*	75,38	76,00	78	79	80	81

No	IndikatorKinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2013	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	*persen*	72,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	*persen*	15.83	17	19	21	23	25
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	*persen*	48,48	51,50	60,61	66,67	72,73	78,79
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	*persen*	72,83	72,83	73,56	74,29	75,03	75,76
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	*persen*	8,47	11,34	23,39	45,64	70,32	78,99

Indikator misi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang merupakan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan dan untuk pelaksanaan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020. Dalam Pilar II yaitu Jalan Yang Berkeselamatan yang antara lain difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan, dengan 3 (tiga) aksi yaitu :

(1) Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan Jalan

(2) Pengadaan Perlengkapan Jalan

(3) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Perlengkapan Jalan

Selain itu didalam misi keempat tersebut dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat, sesuai pemaparan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengemban tugas yaitu :

(a) Infrastruktur Jalan dan Kereta Api dengan mendorong pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati – Cirebon dan Mendorong pembangunan jalan kereta api khusus barang/ kargo;

(b) Infrastruktur Perhubungan berupa :

- Pembangunan Bandara Kertajati
- Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional di Jawa Barat
- Pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman
- Pengembangan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan modern

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat/Kab/Kota

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014 yang menyebutkan bahwa Pentahapan Pembangunan Dalam RPJPN 2005-2025 telah memasuki RPJMN 2 (2010 – 2014) dengan Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalahditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Sesuai Visi dan Misi Pembangunan Nasional RPJMN 2 (2010 – 2014) sasaran pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan dalam bidang infrastruktur adalah meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi, dengan Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2010 – 2014 bidang Infrastruktur yang terakait Perhubungan adalah :

1) Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda
2) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan)

Prioritas ke 6 adalah Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai RPJMN Tahun 2010-2014, penyediaan infrastruktur transportasi diprioritaskan untuk menjamin aksesibilitas bagi masyarakat dengan tingkat pelayanan optimal serta harga terjangkau, khususnya bagi masyrakat yang berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur khususnya Perhubungan adalah Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini serta Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010 – 2014 bidang infrastruktur khususnya Perhubungan, direncanakan dengan program/ kegiatan antara lain sebagai berikut :

NO.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terbangunnya terminal antar negara dan antar provinsi di 15 lokasi per tahun	15 lokasi per tahun	lokasi
2.	Pembangunan Bus Air	Terbangunnya unit bus air	Unit bus air
3.	Pembangunan dan pengelolaan prasarana KA	954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda
4.	Pembangunan sarana KA	186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus
5.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	205 paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi	Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi
6.	Rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat	5 Paket	Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ
7.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas 275lokasi rasarana dan fasilitas pelabuhan tama, pengumpul, pengumpan (non strategis)	lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014, Kementerian Perhubungan telah menyusunan Rencana Strategis dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Dan telah dirubah dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1134 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Penajaman / penyempurnaan Renstra Kementerian Perhubungan dimaksud berkenaan dengan adanya kebijakan di tingkat nasional berupa ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 maupun adanya proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Kementerian Perhubungan dan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2010 yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2012.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya dari sektor transportasi adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda yang bertujuan untuk menyusun rencana pengembangan transportasi antar/ multimoda guna mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang yang efektif baik dalam kerangka waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang di pelabuhan termasuk proses intermoda antara angkutan laut dengan angkutan lainnya dengan tetap memperhatikan/pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, sesuai RPJMN 2010-2014 prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Menjamin tersedianya infrastruktur guna mendukung peningkatan kesejahteraan yang difokuskan pada peningkatan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing produk nasional yang difokuskan untuk meningkatkan daya saing sektor riil, termasuk peningkatan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi melalui kerjasama dengan Pemerintah.

Peningkatan pelayanan transportasi meinimal yang memadai dan merata juga menjadi prirotas untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang menjamin distribusi barang untuk masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan (angkutan perintis) dari dan atau menuju daerah pedesaan. Sedangkan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan adalah wilayah perbatasan, pulau terluar/ terpencil melalui pemberian subsidi transportasi perintis, melalui *Public Service Obligation* untuk angkutan penumpang kelas ekonomi kereta api dan angkutan laut.

Dalam Renstra Kementerian Perhubungan dijelaskan pula bahwa dalam penyelenggaraan infrastruktur sektor transportasi, hal lain yang juga penting mendapat perhatian adalah terkait dengan masalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan sebagian infrastruktur sektor transportasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan azas tugas pembantuan dan melimpahkan sebagian urusan Pemrintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk kegiatan fisik maupun non fisik. Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan semangat dalam paket Undang-Undang Transportasi, dalm hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan sarana/ prasarana transportasi, termasuk peningkatan efisiensi dan efektifitas, disampaing untuk meningkatkan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai Renstra Kementerian Perhubungan Tujuan pembangunan nasional Transportasi 2010 – 2014 adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis dengan Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah:

a) Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
b) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
c) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi;

d) Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
e) Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya dari sektor transportasi adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda yang bertujuan untuk menyusun rencana pengembangan transportasi antar/ multimoda guna mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang yang efektif baik dalam kerangka waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang di pelabuhan termasuk proses intermoda antara angkutan laut dengan angkutan lainnya dengan tetap memperhatikan/pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai gambaran sinergitas rencana dan program dengan Renstra Dinas Perhubungan kabupaten/kota, berikut pembahasan Renstra beberapa Dinas Perhubungan kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 bahwa sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas
2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman
3. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan
4. Meningkatnya aparatur yang profesional dan handal

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ada keselarasan dalam upaya mengatasi kemacetan dengan mengedepankan Sarana Angkutan Umum yang salah satu Kebijakannya adalah Manajemen Angkutan Umum dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di bidang angkutan umum antara lain adalah: Pengembangan sistem angkutan masal, seperti mengganti kendaraan umum

kapasitas kecil (angkot) dengan kendaraan umum kapasitas besar dan pembangunan kereta api perkotaan (MRT dan LRT).

Selain itu juga disebutkan bahwa salah satu upaya manajemen terminal dan untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan antara lain adalah pembangunan terminal terpadu; Hal ini sejalan dengan rencana dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Perubahan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 yang ditetapkan pada bulan Februari 2014, Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menjadi Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan, visi ini selaras dengan visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018. Salah satu indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten, indikator tersebut juga sejalan dengan Indikator Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Majelangka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031 dalam pasal 37 di jelaskan bahwa rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ditetapkan dalam menjadi kawasan strategis Provinsi (KSP) sesuai pasal 36. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

a. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity; dan
b. KSP Koridor Bandung-Cirebon.

Dalam BAB I RPJMD Kabupaten Majelangka Tahun 2014 – 2018 dijelaskan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat yang didukung dengan Kertajati Aerocity ditetapkan di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya, dan atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan bandara meliputi upaya untuk :

1) Mengembangkan kawasan bandara dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat;

2) Mengembangkan bandara;
3) Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya;
4) Kerjasama dengan pihak swasta;
5) Mengembangkan dan memberdayakan potensi bandara.

Dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi terdapat keselarasan dalam pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Hal itu nampak pada tabel 5.3. Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Dinas berdasarkan RPJMD Perubahan BAB V yang menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah bidang perhubungan adalah Pelabuhan dan Dermaga dengan program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Darat, Laut dan Udara), dengan kegiatannya salah satunya adalah Kegiatan Pembebasan lahan pelabuhan pengumpan regional Palabuhanratu.

Indikator lainnya yang selaras adalah Kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan dengan program Program Pemeliharaan Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Darat

Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Palabuhanratu yang telah dilakukan kajian/study awalnya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan pekerjaan fisiknya oleh Kementerian Perhubungan melalui Satker/UPP Palabuhanratu. Sedangkan indikator kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan selaras dengan indikator pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi.

Dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018 pada BAB VII terdapat rumusan kebijakan umum pembangunan jangka menengah dalam 5 (lima) tahun kedepan urusan wajib antara lain urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan dan peningkatkan sarana dan prasanan transportasi masyarakat;
b. Peningkatan dan pengembangkan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas;

c. Revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;
d. Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas jalan raya dalam rangka mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Subang serta menjaga konektivitas wilayah.

Kebijakan umum untuk urusan wajib Perhubungan tersebut di atas, hamper semuanya selaras dengan program-program atapun kegiatan-kegiatan yang dijalankan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Untuk kebijakan Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Subang serta menjaga konektivitas wilayah ini memberikan peluang untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Subang yang mendukung konektivitas wilayah. Sarana dan prasarana perhubungan ini dapat berupa Transportasi Darat, Transportasi Laut, dan Transportasi Udara. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan Petimban di Kabupaten Subang yang telah menjadi program/ kegiatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Satker Pamanukan untuk membangun dan mengembangan pelabuhan Patimban.

Untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan bidang Perhubungan di Provinsi Jawa Barat, dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota diupayakan peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam forum-forum perencanaan sesuai peraturan perundangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam mewujudkan pembanguan infrastruktur bidang perhubungan khususnya infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Daerah menghadapi pula berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat internal. Dinamika internal tersebut lebih menggambarkan kinerja yang mempengaruhi penataan ruang Daerah, yaitu perubahan fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang berasal dari dalam wilayah tersebut. Isu internal terutama tingginya pertumbuhan jumlah penduduk.Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2013 penduduk Jawa Barat mencapai 45.340.800 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 46.029.600 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 1,52%, menurun 0,25 persen bila dibandingkan dengan LPP Tahun 2013, yang

sebesar 1,77%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Tahun 2013-2014

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	45.340.800	46.029.600
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,77	1,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Jumlah penduduk bekerja (usia 15 tahun ke atas) di Jawa Barat pada tahun 2014 (Agustus) mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014 (Agustus) penduduk bekerja tercatat sebanyak 19.230.943 orang, sedangkan pada tahun 2013 (Agustus) penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18.731.943 orang. Dengan demikian mengalami kenaikan sebesar 499.000 orang yang bekerja.

Tabel 3.4.

Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2014

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.	Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	Juta orang	32,82	33,46
2.	Penduduk Angkatan Kerja	Juta orang	20,62	21,00
3.	Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas)	Juta orang	18,73	19,23
4.	Penganggur (Mencari Kerja)	Juta orang	1,88	1,77
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,82	62,77
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,16	8,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi penduduk yang sedang mencari pekerjaan secara aktif maupun mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha terhadap angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT memiliki kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. TPT pada

Tahun 2014 adalah 8,45% menurun dibandingkan Tahun 2013, yang sebesar 9,16%, (lihat Tabel 3.4.).

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama tahun 2014, penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan sebesar 4,93 juta orang (25,62%), industri sebesar 3,90 juta orang (20,29%) dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perburuan sebanyak 3,82 juta orang (19,87%), diikuti oleh jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan sebesar 3,29 juta orang (17,12%), (lihat Tabel 3.5.)

Tabel 3.5.

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014

NO	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	JUMLAH (Org)	%
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perburuan	3.821.320	19,87
2.	Pertambangan dan Penggalian	142.371	0,74
3.	Industri	3.902.850	20,29
4.	Listrik, Gas dan Air	59.651	0,31
5.	Konstruksi	1.485.424	7,72
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	4.926.566	25,62
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	1.000.908	5,20
8.	Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	600.262	3,12
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	3.291.591	17,12
Total		19.230.943	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan,dan 5.316 desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda dan siap untuk dikembangkan.

Selain itu sesuai dengan karakteristik Jawa Barat, beberapa daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain, yang perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik serta menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan.

Sinergitas dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Jawa Barat juga harus mempertimbangkan keterpaduan penataan ruang wilayah yang mengakomodasi kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Selain itu pembangunan di Provinsi Jawa Barat juga mempedomani Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, yang meliputi :

a. Wilayah Metropolitan Bodebekkarpur;
b. Wilayah Metropolitan Bandung Raya;
c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya;
d. Wilayah Pusat Pertumbuhan Pengadaran;
e. Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu; dan
f. Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya.

Dalam setiap wilayah tersebut terdapat rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan

tersebut. Dan dalam rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis tersebut, terdapat pembangunan infrastruktur transportasi perhubungan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
3) Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dan *Jabar Cyber Province*
6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province*.
7) Kualitas demokrasi dan Pemilu Nasional tahun 2014.
8) Adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.
9) Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
10) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016.
11) Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
12) Penegakan dan harmonisasi produk hukum
13) Pengelolaan aset daerah.
14) Pelestarian Budaya Lokal
15) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
16) Harmonisasi Perencanaan Pusat, Provinsi dan antar Kabupaten/Kota.
17) Daerah Perbatasan.
18) Penanggulangan penduduk miskin.
19) Pasar global dan *Asean – China Free Trade Area* (ACFTA)
20) Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan
21) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial

22) Pemerataan pembangunan antar daerah
23) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah :

1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport.*
2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.
3. Persentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentase;
4. Jumlah kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil yang meningkat antara lain dikarenakan adanya kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor yaitu melalui kemudahan dalam proses pembelian kendaraan bermotor secara kredit dan kondisi angkutan umum saat ini yang belum memadai;
5. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional;
6. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi;
7. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang;
8. Pemisahan regulator dan operator pada transportasi udara masih belum sempurna karena adanya tumpeng tindih kewenangan antara unit-unit organisasi;
9. Mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandar udara di Jawa Barat sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional, berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara di Jawa Barat;

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat,

udara dan laut serta perkeretaapin dihadapkan pada persoalan real (nyata) berupa rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa :

1. Masih kurangnya pembangunan jalan tol;
2. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
3. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel;
4. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
5. Belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa Barat;
6. Masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga.
7. Komoditas eksport dan import dari dan ke Jawa Barat masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan pembangunan Pelabuhan Laut sebagai pengganti rencana pembangunan pelabuahan internasional Cilamaya dan pelabuhan lainnya untuk mendukung pergerakan orang dan barang di wilayah Jawa Barat;
8. Tingginya pelanggaran muatan angkutan barang di Jawa Barat.

Sementara itu, pada sisi lain ada delapan (8) tantangan utama yang di hadapi pemerintah Propinsi Jawa Barat (RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013) yang hingga saat ini relevan untuk ditindaklanjuti di dalam pengembangan infrastruktur wilayahnya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan umum massal terutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat;
2. Pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal;
3. Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif;
4. Revitalisasi dan pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan antarkota;

5. Pengaturan pergerakan (*traffic management*) untuk angkutan barang dan angkutan penumpang
6. Peningkatan pelayanan bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan ASDP yang ada dan mengembangkan pelabuhan laut dan ASDP baru;
8. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda.

Untuk menggambarkan kesesuaian antara isu-isu strategis dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut, Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi dasar atau acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018).

Tabel 3.6

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

TUGAS POKOK dan FUNGSI	
TUGAS POKOK	**Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan** berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
FUNGSI	**Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta kebijakan teknis** transportasi darat, transportasi laut dan ADP, transportasi udara dan bina sistem operasional transportasi.
	Penyelenggaraan fasilitas dan perhubungan meliputi transportasi darat, trasnportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan bina sistem operasional trasnportasi.
	Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi trasnportasi darat, trasnportasi laut dan asdp, trasnportasi udara dan bina sistem operasional trasnportasi.
	Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD/ Balai
↓	
ISU STRATEGIS DISHUB JABAR	
1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur (sumber daya manusia /SDM) Perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan;	

2. Belum berkembangnya penyediaan system angkutan umum massal (BRT, Kereta Api dan lain-lain) yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
3. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Masih rendahnya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
5. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
6. Belum termanfaatkannya IPTEK pada penyelenggaraan Transportasi Darat;
7. Belum terwujudnya Pembangunan pelabuhan laut Internasional di Jawa Barat untuk mendukung pergerakan barang dan jasa;
8. Belum terwujudnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional.
9. Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
10. Belum terwujudnya fasilitas prasarana transportasi udara di Jawa Barat;
11. Belum terwujudnya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4.1.1 Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pemerintah provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perhubungan Jawa Barat menetapkan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya sistem pergerakan yang Handal dan Efisien"

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat dijabarkan dalam 2 (dua) kata kunci (*key words*) yang perlu dijelaskan agar terjadi kesamaan persepsi dalam pemahaman visi tersebut.

Pertama **:** Sistem pergerakan yang handal adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau, dan efektif, menjangkau seluruh daerah

di Jawa Barat serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju jawa barat maju dan sejahtera untuk semua.

Sehingga kata **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok

Kedua **:** Sistem pergerakan yang efisien adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi secara efisien dan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan dan dilayani oleh SDM yang profesional serta dapat mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua.

Kondisi sebagaimana dimaksud dalam **butir kedua** tersebut adalah suatu kondisi transportasi yang memiliki daya saing atau Transportasi yang Berdaya Saing yang diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif

4.1.2 Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan menetapkan 2 (dua) misi yang akan dilaksanakan. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi di Jawa Barat
2. Meningkatkan Jalan yang berkeselamatan di Jawa Barat

4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ada pada Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan, dengan tujuan** Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar dan sasaran Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Mengingat peningkatan daya saing juga merupakan yang harus diwujudkan dalam menghadapi tantangan global maupun regional, dan infrastruktur transportasi merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, maka

pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi di Jawa Barat menjadi bagian yang menjadi tugas yang diemban Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	1. Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
			2. Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum
			3. Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	4. Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
			5. Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	6. Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
			7. Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
			8. Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)
4	Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	9. Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi

Target dari Indikator yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1

Indikator dan Target Capaian Renstra 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2013	Target				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	*persen*	23,08	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78
2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum	*persen*	0,17	0,22	25,17	50,12	75,06	100
3	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	*persen*	*NA*	88	91	94	97	100
4	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	*persen*	75,38	76,00	78	79	80	81
5	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	*persen*	72,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	*persen*	15.83	17	19	21	23	25
7	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	*persen*	48,48	51,50	60,61	66,67	72,73	78,79
8	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	*persen*	72,83	72,83	73,56	74,29	75,03	75,76
9	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	*persen*	8,47	11,34	23,39	45,64	70,32	78,99

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Rumusan pernyataan Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Menurut RPJMD Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan strategi yaitu Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan menerapkan kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merencanakan strategi dan kebijakan untuk lima tahun kedepan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Strategi	Kebijakan
1	Peningkatan pelayanan moda transportasi umum	Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui wahana tata nugraha (WTN) dan pembinaan pengemudi kendaraan umum
		Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi Umum
		Peningkatan layanan transportasi pada jaringan dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat
2	Peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan umum	Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan
		Pembinaan, supervisi dan koordinasi teknis bidang perhubungan
3	Peningkatan ketersediaan prasarana transportasi	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi
4	Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 ada sebanyak 13 (tiga belas) program yang terdiri dari 1 (satu) program pada Bidang Perencanaan Pembangunan, 5 (lima) program pada Bidang Perhubungan, 6 (enam) program pada Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian serta 1 (satu) program Bidang Statistik, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Program Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Kode Program	Program	Keterangan
1	29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan
2	49	Program PembangunannPrasarana dan Fasilitas Perhubungan	Bidang Perhubungan
3	50	Program Rehabilitas Dan Pemel Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
4	51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Perhubungan
5	52.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bidang Perhubungan
6	53	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
7	57	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
8	59	Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9	60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
10	61	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11	62	Program Pemeliharan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
12	66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
13	75	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bidang Statistik

Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.

Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	1. Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
		2. Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum
		3. Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	4. Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
		5. Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	6. Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
		7. Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
		8. Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)
4	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	9. Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi

5.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan sumber daya manusia perhubungan yaitu: Jumlah (kuantitas) dan kualitas profesionalisme sumber daya manusia yang belum memadai; Belum tersusunnya Rencana Umum Pengembangan SDM Aparatur; dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur sesuai dengan perkembangan sektor transportasi. Maka di rencanakan kebutuhan pegawai sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

REKAP DATA KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2013-2018
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	III	34	40	45	43	46	49	
	II	121	135	143	166	180	191	
	Jumlah	155	175	188	209	226	240	

DATA KEBUTUHAN PENDIDIKAN FORMAL

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	S1	27	28	33	43	46	49	
	D3	33	39	42	42	43	44	
	D2	8	8	8	9	9	9	
	SLTA	87	100	105	115	128	138	
	Jumlah	155	175	188	209	226	240	

DATA KEBUTUHAN DIKLAT

NO	DIKLAT	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	DIKLAT BIDANG KETATAUSAHAAN	17	19	21	22	25	29	
2	DIKLAT BIDANG DARAT	74	87	91	100	106	112	
3	DIKLAT BIDANG LAUT	3	4	3	3	9	9	
4	DIKLAT BIDANG UDARA	13	13	16	17	17	18	
5	DIKLAT LAIN-LAIN	48	52	57	67	69	72	
	JUMLAH	155	175	188	209	226	240	

Sumber: Subag Kepegawaian dan umum Tahun 2013

Rencana kegiatan, kelompok sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2013 – 2018 terdapat pada Formulir S-4 sebagaimana terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penyusunan indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada akhir periode. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Penyusunan indikator kinerja ini, didasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Selain itu juga didasarkan pada visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, bidang Perhubungan mengemban tugas pada Misi Keempat ***Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.*** Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan salah satu tujuan penyelenggaraan perhubungan adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Bidang perhubungan juga mengemban tugas untuk peningkatan daya saing yang harus diwujudkan dalam menghadapi tantangan global maupun regional, dan infrastruktur transportasi merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, maka pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi di Jawa Barat yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Berikut ini (Terlampir pada Tabel 6.1.) adalah tabel susunan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2013	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentasekeikutsertaankabupaten/kot adalam WTN	*persen*	23,08	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum	*persen*	0,17	0,22	25,17	50,12	75,06	100
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	*persen*	*NA*	88	91	94	97	100
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di JembatanTimbang	*persen*	75,38	76,00	78	79	80	81
5	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	*persen*	72,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	*persen*	48,48	51,50	60,61	66,67	72,73	78,79
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	*persen*	72,83	72,83	73,56	74,29	75,03	75,76
8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	*persen*	8,47	11,34	23,39	45,64	70,32	78,99
9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	*persen*	15.83	17	19	21	23	25

BAB VII
PENUTUP

Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2013 telah berhasil meletakkan landasan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjaga sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat berfungsi dengan baik.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan penunjang penggerak pembangunan di Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi untuk peningkatan aksebilitas pergerakan orang, barang dan jasa.

Pembangunan perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara.

Renstra SKPD harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Reviu Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 sebagai tindak lanjut reviu dan penelaahan penyelenggaraan SAKIP oleh Kemenpan R.I. Atas reviu tersebut perlu dilakukan penyelarasan dan penyesuaian perencanaan strategis khususnya keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 serta memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 atau dikenal dengan **Tahap Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh**.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dapat dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas, dan perencanaan penganggaran;
2. Penyusunan Renstra serta perencanaan penganggaran Dinas Perhubungan kabupaten dan kota se Jawa Barat;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah pusat , Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat serta pemangku kepentingan di Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2013 - 2018.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Formulir S-1

FORMULIR S-1

Tabel S-1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat

TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	**Sesuai Permenhub No. kM 81 Tahun 2011**																		
1	**Angkutan Sungai dan Danau**																		
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	75%	-	-	-	-	70	76.47	65.39	-	-	70	76.47	65.39	-	-	100%	100%	100%
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c. Keselamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	100%	-	-	-	-			90.91	-	-	-	-	90.91	-	-			100%
2	**Angkutan Penyeberangan**																		
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	75%	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100%	100%	100%
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c. Keselamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	**Angkutan Laut**																		
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c. Keselamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Indikator Lainnya																		
1	Jumlah Studi/Perencanaan/Kajian/Penelitian/Dokumen bidang transportasi laut & ASDP	-	-	27	0	0	7	7	12	0	0	2	3	7	0	0	29%	43%	58%
2	Jumlah kapal penumpang/Barang	-	-	1,819	900	1250	1500	1700	1819	900	1100	1302	1550	1819	100%	88%	87%	91%	100%
3	Jumlah fasilitas keselamatan pelabuhan laut & ASDP	-	-	15%	0.0%	0.0%	5.0%	10.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	12.25%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	81.7%
4	Jumlah pelabuhan	-	-	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dermaga/landing area	-	-	33	5	7	7	7	7	0	4	4	4	4	0.0%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%
6	Tingkat perencanaan pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Jawa Barat bagian selatan di Palabuhanratu	-	-	2%	0	0	0	0.90%	1.10%	0	0	0	0.67%	1.07%	0	0	0	74%	97%
7	Tingkat dukungan terhadap penyelesaian pembangunan Pelabuhan Utama Cilamaya	-	-	30%	0	0	0	18%	12%	0	0	0	17.3%	10.60%	0	0	0	96%	88%

Formulir S-1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT

TRANSPORTASI DARAT

	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUPOKSI OPD	TARGET SPM (tahun 2014)	TARGET IKK	Target Indikator	Target Renstra OPD Tahun ke ...					Realisasi Renstra OPD Tahun ke ...					Rasio Capaian Tahun ke ...				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
I.	**ANGKUTAN JALAN**																		
a.	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	100%			79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	79.25	100	100	100	100	100
b.	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	100%			73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	73.91	100	100	100	100	100
c.	Fasilitas Perlengkapan Jalan	60%			10.72	11.91	11.91	14.70	16.25	10.72	11.91	11.91	14.70	16.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
d.	Keselamatan	100%			79.06	79.17	71.74	71.58	76.40	79.06	79.17	71.74	71.58	76.40	100	100	100	100	100
e.	Sumber Daya Manusia	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	- Jumlah kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi				147	147	147	147	147	147	147	147	147	147					
	- pengawasan kelaikan kendaraan pd perusahaan angkutan umum				38	38	38	38	38	38	38	38	38	38					
	- pengelola terminal				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65					
	- pengelola perlengkapan jalan				44	44	44	44	44	44	44	44	44	44					

LAMPIRAN 2

Formulir S-2

FORMULIR S-2

Tabel S-2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,476,210,000	-	-	-	-	63,592,367	-	-	-	-	2.57%					495,242,000	12,718,473
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	9,212,460,817	-	-	-	-	8,927,306,419	-	-	-	-	96.90%					1,842,492,163	1,785,461,284
3	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR	1,611,935,016	-	-	-	-	1,541,705,000	-	-	-	-	95.64%					322,387,003	308,341,000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN TELEKOMUNIKASI	8,077,577,900	-	-	-	-	7,427,559,160	-	-	-	-	91.95%					1,615,515,580	1,485,511,832
5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	-	171,821,011,000	204,975,309,000	103,096,840,150	75,843,022,540	-	14,335,640,344	176,019,337,939	89,743,146,270	74,247,584,455		8.34%	85.87%	87.05%	97.90%	111,147,236,538	70,869,141,802
6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS (LLAJ)	-	4,528,915,000	1,500,000,000	2,308,235,502	4,130,685,250	-	3,599,296,213	1,319,698,900	2,254,778,900	3,977,672,750		79.47%	87.98%	97.68%	96.30%	2,493,567,150	2,230,289,353
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	-	1,562,405,500	450,000,000	550,000,000	350,000,000	-	1,402,910,500	317,111,850	538,037,500	343,955,000		89.79%	70.47%	97.83%	98.27%	582,481,100	520,402,970
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	-	2,121,666,000	740,000,000	1,400,000,000	1,051,000,000	-	2,050,690,250	625,940,250	1,392,317,500	951,370,435		96.65%	84.59%	99.45%	90.52%	1,062,533,200	1,004,063,687
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	1,383,232,500	1,259,775,000	1,259,775,000	1,389,655,000	-	1,111,567,375	1,008,257,550	1,178,689,439	1,199,819,300		80.36%	80.03%	93.56%	86.34%	1,058,487,500	899,666,733

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	-	339,025,000			-	-	253,767,540	-		-		74.85%				113,008,333	63,441,885
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	4,677,070,000	4,958,892,226	5,463,942,400	4,352,085,500	-	4,224,890,397	4,826,192,554	5,240,098,845	4,153,920,071		90.33%	97.32%	95.90%	95.45%	3,890,398,025	3,689,020,373
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	700,000,000	2,543,650,000	13,012,291,849	28,749,798,631	-	567,500,080	2,359,006,624	11,660,624,472	27,515,844,542		81.07%	92.74%	89.61%	95.71%	9,001,148,096	8,420,595,144
13	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	100,000,000	100,000,000	120,000,000	124,000,000	-	99,699,000	97,572,000	113,850,000	116,238,500		99.70%	97.57%	94.88%	93.74%	88,800,000	85,471,900
14	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	5,557,445,741	2,903,435,000	3,610,205,306	5,375,951,900	-	5,165,881,865	2,790,402,666	3,543,084,585	5,179,564,945		92.95%	96.11%	98.14%	96.35%	3,489,407,589	3,335,786,812
15	PROGRAM PENINGKATAN KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR	-	-	200,000,000	246,000,000	170,000,000	-	-	197,530,000	244,622,000	160,004,000			98.77%	99.44%	94.12%	123,200,000	120,431,200
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-		144,508,000					96.34%	30,000,000	36,127,000
	JUMLAH	**21,378,183,733**	**192,790,770,741**	**219,631,061,226**	**131,067,290,207**	**121,686,198,821**	**17,960,162,946**	**32,811,843,564**	**189,561,050,333**	**115,909,249,511**	**117,990,481,998**						**137,310,700,945**	**94,846,557,670**

LAMPIRAN 3

Formulir S3

FORMULIR S-3

Tabel S-3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Capaian 2013	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	23.08%	33.33%	44.44%	55.56%	66.67%	77.78%
			Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	0.17%	0.22%	25.17%	50.12%	75.06%	100%
			Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	na	*88.00%*	*91%*	94%	97%	100%
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	75.38%	76.00%	78%	79%	80%	81%
			Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	72.89%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	48.48%	51.52%	60.61%	66.67%	72.73%	78.79%
			Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	72.83%	72.83%	73.56%	74.29%	75.03%	75.76%
			Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	8.47%	11.34%	23.39%	45.64%	70.32%	78.99%
4	Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	15.83%	17%	19.00%	21%	23%	25%

LAMPIRAN 4

Formulir S4

FORMULIR S-4

Tabel S-4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

RUTIN / PELAYANAN DASAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
							2014		2015		2016		2017		2018			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perhubungan yang mampu mendukung pelayanan transportasi	Terwujudnya pengembangan pegawai perhubungan berbasis kompetensi jabatan	Prosentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis PPNS dan Presentase PNS yang telah memiliki sertifikat kompetensi penguji																
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPD/Balai /UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya													
	terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD berdasarkan analisis standar biaya operasional unit kerja SKPD/Balai /UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Kantor Pusat dan UPTD/ Balai dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	4,986,080,000	100%	5,165,847,000	100%	4,724,195,000	100%	10,426,082,000	100%	10,500,000,000		35,802,204,000
				Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi													
	adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan	tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi		Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	adanya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	85,537,000.00	100%	111,640,000	100%	158,655,000	100%	313,182,000	100%	320,000,000		989,014,000
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan data/informas/statistik daerah													
	Dukungan basis data yang akurat,terukur dan terintegrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan data/informas/statistik daerah		Meningkatkan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	adanya sistem data dan informasi	50%	60%	48,762,000	75%	60,300,000	80%	120,220,000	85%	144,720,000	90%	200,000,000		574,002,000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan													
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah		(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan UPTD/ Balai;	meningkatnya sarana dan prasarana	100%	100%	10,079,084,000	100%	28,733,151,000	100%	4,811,051,000	100%	7,273,100,000	100%	10,000,000,000		60,895,386,000
				(2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Perda No. 3 tahun 2011, tentang penyelenggaraan perhubungan	adanya juklak perda no 3 Tahun 2011													
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target dan Alokasi Anggaran (Rp.000)										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
							2014		2015		2016		2017		2018			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD	Prosentase sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD yang terpelihara sesuai standar baku pemeliharaan		Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat dan UPTD/ Balai dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	terpeliharanya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	5,734,489,000	100%	6,677,597,000	100%	5,498,693,000	100%	11,294,257,000	100%	12,000,000,000		41,205,036,000
				Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah													
	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah		Peningkatan Kesejahtaraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Adanya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur	N/A	50%	1,050,740,000	55%	1,282,617,000	60%	1,102,391,000	65%	1,624,140,000	70%	1,700,000,000		6,759,888,000
	JUMLAH TOTAL							21,984,692,000		42,031,152,000		16,415,205,000		31,075,481,000		34,720,000,000		146,226,530,000

FORMULIR S-4

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkat nya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	8.47%	310,957,030,564	11.34%	338,651,988,940	23.39%	158,936,837,987	45.64%	49,898,816,000	70.32%	50,203,712,000	78.99%	526,723,275,000	78.99%	526,723,275,000
			Prosentase ketersediaan dermaga/ pelabuhan ASDP		Prosentase ketersediaan dermaga/ pelabuhan ASDP	48.48%		51.50%		60.61%		66.67%		72.73%		78.79%		78.79%	
			Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	72.83%		72.83%		73.56%		74.29%		75.03%		75.76%		75.76%	
				Perencanaan Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			914,475,500												
				Penyusunan Sistem Informasi Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Majalengka			157,864,300												
				Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab Majalengka dan Pemantauan Fasilitas Bandara di Jawa Barat			364,006,000												
				Persiapan Penertiban Lahan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat			116,910,000												
				Penyusunan DED Pembangunan dan Reaktivasi jalur KA di Jawa Barat			21,700,000												
				Penyusunan AMDAL Pelabuhan laut di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi			524,221,400												
				Penyusunan DED Pelabuhan Laut Regional Jawa Barat Bagian Selatan			696,836,300												
				Penyusunan DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut di Palabuhanratu Kab Sukabumi			592,030,000												
				Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat			273,877,350,802												
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan ASDP di Jawa Barat			4,647,978,585												
				Review Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) dan Review Penyusunan Rancangan Teknis Terinci (RTT) BIJB Kertajati Majalengka			1,793,010,400												
				Pembuatan Artist Impression dan Persiapan Penyusunan Dokumen Teknis Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB Kertajati Majalengka)			135,001,500												
				Fasilitasi Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya			378,359,179												
				Pengadaan Tanah untuk Shortcut Jalur KA Cibungur (Purwakarta) - Tanjungrasa (Subang)			345,127,098												
				Fasilitasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jawa Barat			93,895,000												
				Optimalisasi Bandara Nusawiru Clamis (Penataan Asset)			26,036,624,000												
				Updating Data Pendukung AMDAL BIJB Kertajati Jawa Barat			261,640,500												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shotcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa					24,813,000,000.00										
				Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					200,000,000.00										
				Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat					869,948,000.00										
				Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya					50,000,000.00										
				Sosialisasi Keselamatan Pelayaran					50,000,000.00										
				Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan					171,170,000.00										
				Penyusunan RTT Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka					5,779,316,940.00										
				Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi					499,400,000.00										
				Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat					100,000,000.00										
				Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab Majalengka					1,472,154,000.00										
				Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat					300,000,000,000.00										
				Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat					1,000,000,000.00										
				Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari					200,000,000.00										
				Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat					384,350,000.00										
				DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap I)					1,207,650,000.00										
				FS Terminal Terpadu di Jawa Barat					500,000,000.00										
				Penyusunan DED Gedung Disply BIJB Kertajati					-										
				Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX					55,000,000.00										
				Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru					1,300,000,000.00										
				Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata							843,880,000.00								
				Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Saguling							843,880,000.00								
				Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat							1,462,500,000.00								
				Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat							560,400,000.00								
				DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari Tahap II							1,729,291,000.00								
				Sertifikasi Jalur Kereta Api Shortcut Cibungur - Tanjungrasa							65,999,967.00								
				Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Di Jabar Bagian Utara							195,000,000.00								
				Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP Penyeberangan Sungai Citanduy di Padaherang (Jabar-Jateng)							753,032,000.00								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekspor dan Perdagangan Bagian Timur							146,250,000.00								
				Penyusunan study kelayakan pelabuhan laut regional Jabar Bagian Utara							852,405,000.00								
				BIJB - Koordinasi Pembangunan BIJB Kertajati Kab Majalengka							370,500,000.00								
				Penerangan sekitar Bandara di Nusawiru untuk Menunjang PON XIX							2,925,000,000.00								
				Penataan Lahan Parkir untuk Menujang PON XIX							4,631,250,000.00								
				Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat							146,250,000.00								
				BIJB - Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati							705,000,000.00								
				BIJB-Studi Intermodality Layanan Transportasi Di BIJB Kertajati							1,150,000,000.00								
				BIJB-Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati							300,000,000.00								
				BIJB - Project Management Service (PMS) untuk Pembangunan BIJB Kertajati							1,100,000,000.00								
				PON - Pembangunan Hanggar Bandara Nusawiru untuk Kegiatan Terjun Panyung PON XIX							3,000,000,000.00								
				Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat							133,656,200,000.00								
				Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Shortcut jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa							3,500,000,000.00								
				BIJB Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Bandara (BIJB) dan Kertajati Aerocity									268,830,000.00						
				PPP Pengembangan Bandara Nusawiru Pangandaran Untuk Menunjang PON XIX									5,969,500,000.00						
				Review FS Rencana Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi									441,080,000.00						
				Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat									1,183,500,000.00						
				PPP Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Darat Bandar Udara Nusawiru Kab Pangandaran									982,705,000.00						
				BIJB Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati									4,990,000,000.00						
				PPP Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Sisi Udara Bandar Udara Nusawiru Kab Pangandaran									983,965,000.00						
				BIJB Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati									631,505,000.00						
				BIJB Pengamanan Aset Lahan BIJB di Kertajati									1,049,850,000.00						
				Sinergitas Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat									423,000,000.00						
				Penyusunan Dokumen AMDAL Bandar Udara Nusawiru Kab Pangandaran									798,905,000.00						
				Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru									892,300,000.00						
				Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat									257,660,000.00						
				METR Studi Transportasi Metropolitan Bodebek Karpur									374,170,000.00						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				CLTH KKP Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Landasan Pacu Di Wilayah Jabar Selatan									422,840,000.00						
				Sinergitas Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat									396,470,000.00						
				Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati									21,985,148,000.00						
				Penyusunan DED Pelabuhan Penyeberangan di Indramayu dan Danau Jatiluhur Purwakarta									475,000,000.00						
				Proses Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB									990,818,000.00						
				Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Barat									172,300,000.00						
				METR Penyusunan FS Angkutan Massal Bandung - Lembang Berbasis Jalan Rel									994,820,000.00						
				METR Review FS dan Trase Kereta Api Tanjungsari - Bandara Kertajati - Arjawinangun									993,670,000.00						
				CLTH KKP Penyusunan FS dan Master Plan Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang)									726,670,000.00						
				CLTH Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat									448,000,000.00						
				PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya									197,040,000.00						
				PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya									197,040,000.00						
				PPP Menyusun Rencana Induk Transportasi Terintegrasi di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya									197,040,000.00						
				METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Ciwidey - Rancabuaya									495,170,000.00						
				METR Menyusun FS Pembangunan Jalur Kereta Api Sukabumi - Pelabuhanratu									494,620,000.00						
				METR Penanganan Dampak Sosial dan Persiapan Pembebasan Lahan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari dan Banjar- Pangandaran - Cijulang									1,465,200,000.00						
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat											371,450,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat											754,100,000.00				
				Kegiatan Persiapan Perencanaan Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari											377,500,000.00				
				Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Kebutuhan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari											975,400,000.00				
				Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat											3,544,900,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan)											126,870,000.00				
				Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata											393,710,000.00				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kegiatan CLTH- Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kabupaten Sukabumi											717,870,000.00				
				Kegiatan CLTH-Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palampang) Kabupaten Sukabumi											637,715,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat											443,040,000.00				
				Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai dan Danau di Jawa Barat											632,750,000.00				
				Kegiatan BIJB Pembangunan Pagar BIJB dikertajati (Lanjutan)											5,072,610,000.00				
				Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru											287,560,000.00				
				Kegiatan Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati (Lanjutan)											24,982,380,000.00				
				Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BIJB											291,260,000.00				
				Kegiatan Pembangunan Pagar Bandara Nusawiru (Lanjutan)											4,972,570,000.00				
				Kegiatan Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan) di Bandara Nusawiru Kab Pangandaran											2,484,310,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati											722,835,000.00				
				BIJB- Multi Aksi Pihak Implementasi Pembangunan BIJB di Jawa Barat											138,672,000.00				
				Kegiatan CLTH- Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kabupaten Sukabumi											972,610,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)											653,600,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Kenavigasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi											650,000,000.00				
				Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BIJB Kertajati													600,000,000		
				Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Bandar Udara Nusawiru Kab Pangandaran													600,000,000		
				Rencana Aksi Multi Pihak-Implementasi Pekerjaan (RAMP-IP) Pengembangan Bandar Udara di Jawa Barat													800,000,000		
				Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis Terinci (RTT) Bandar Udara di Kab Sukabumi													2,500,000,000		
				Penyusunan Dokumen Master Plan Bandar Udara di Kab Garut													1,500,000,000		
				Penyusunan Dokumen KKOP dan BKK BIJB Kertajati Kab Majalengka													900,000,000		
				Penyediaan Konten dan Pembangunan Interior Gedung Display BIJB di Kertajati Majalengka													6,600,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat													448,000,000		
				Penyusunan DLKp dan DLKr Pelabuhan Laut Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi													756,250,000		
				Penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan)													126,870,000		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai dan Danau di Jawa Barat													792,750,000		
				Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)													345,000,000		
				kegiatan Studi Kelayakan (FS) dan Survey Investigasi dan Desain (SID) Pembangunan LRT Bandung Raya Koridor Leuwipanjang – Gedebage – Jatinangor													500,000,000		
				Perencanaan Pembangunan Perkeretapian di Jawa Barat													800,000,000		
				Kegiatan Penataan Jaringan dan Integrasi Antar Moda Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2018													500,000,000		
				Kegiatan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat Tahun 2018													2,148,500,000		
				Kegiatan Persiapan Penataan dan Penertiban Lahan Perkeretaapian di Jawa Barat													500,000,000		
				Perencanaan Pelayanan Transportasi Berbasis Rel di Metropolitan Cirebon Raya													1,000,000,000		
				Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Dan ASDP Di Jawa Barat													14,040,000,000		
				Kegiatan Pembuatan Sertifikasi Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru													287,560,000		
				Kegiatan Pembangunan Gedung Display BIJB di Kertajati													15,707,080,000		
				Kegiatan Pembangunan Pagar BIJB di Kertajati													10,000,000,000		
				Kegiatan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru (Sisi Udara)													43,671,900,000		
				Kegiatan DED Perencanaan Pembangunan Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut													500,000,000		
				Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Penunjang Angkutan di Perairan													246,265,000		
				TWP-Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah wilayah kerja Balai LLAJ Wilayah IV													2,957,100,000		
				Kegiatan Persiapan dan Pengadaan Tanah Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi													11,896,000,000		
				Kegiatan Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat													400,000,000,000		
				Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Bandara Nusawiru													6,000,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	**Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan**	**Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi**	**Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi**	**Program Rehabilitas Dan Pemel Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi**	**15.83%**	**19,071,287,771**	**17%**	**24,454,200,000**	**19%**	**31,297,614,800**	**21%**	**12,797,147,084**	**23%**	**31,330,075,000**	**25%**	**67,121,163,750**	**25%**	**67,121,163,750**
				Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat			17,223,351,311												
				Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas			1,847,936,460												
				Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat					184,200,000.00										
				Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat					22,289,040,000.00										
				Pendamping Untuk Kegiatan DAK Fasilitas Lalu Lintas					270,000,000.00										
				Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan					1,710,960,000.00										
				PON - Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016							7,015,800,000.00								
				Pemasangan dan Pengoperasian CCTV beserta Penentuan Lokasi Fasilitas Lalu Lintas							3,884,550,000.00								
				Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah I Bogor							8,949,019,000.00								
				Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan							9,466,695,800.00								
				PON - Fasilitasi PJU menuju Lokasi-lokasi Venue untuk Cabor (untuk Menunjang PON XIX)							1,981,550,000.00								
				DAK Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan									3,432,170,916.00						
				Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor									2,967,346,168.00						
				Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas di UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan									2,500,730,000.00						
				Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat									1,060,800,000.00						
				METR Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Wilayah Metropolitan Bandung									2,636,100,000.00						
				CLTH KKP Pembuatan Penunjuk Arah (Fasilitas LLAJ) Kawasan Ciletuh									200,000,000.00						
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah I											9,968,625,000.00				
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah IV											8,000,000,000.00				
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah II											5,681,450,000.00				
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah III											5,700,000,000.00				
				Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat											1,980,000,000.00				
				Kegiatan Pengadaan fasilitas pendukung lalu lintas													681,050,000		
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah I													26,425,481,000		
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah II													12,740,850,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah III													10,809,012,000		
				Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Balai pengelolaan LLAJ Wilayah IV													16,464,770,750		
3	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	23.08%	3,034,648,130	33.33%	1,630,250,000	44.44%	8,596,470,000	55.56%	3,244,325,000	66.67%	17,024,982,400	77.78%	6,612,370,000	77.78%	6,612,370,000
			Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	0.17%		0.22%		25.17%		50.12%		75.05%		100%		100%	
			Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	na		88%		91%		94%		97%		100%		100%	
				Pengembangan Sistem Informasi Jaringan Jalan, Jaringan Trayek dan Simpul di Jawa Barat			141,717,530												
				Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas,Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat			248,490,000												
				Penyusunan Dokumen Penataan Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat			669,499,000												
				Penyusunan Dokumen Kelembagaan Pengusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum dan Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara			319,405,500												
				Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru			1,655,536,100												
				Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba Tertib Lalu Lintas					150,000,000.00										
				Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat					150,000,000.00										
				Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi di Perkotaan					150,000,000.00										
				Operasional Bus Sekolah					1,180,250,000.00										
				Penyelenggaraan Angkutan Perorangan Menjadi Badan Hukum							292,500,000.00								
				Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pelajar pelopor keselamatan transportasi darat dan lomba tertib lalu lintas							487,500,000.00								
				Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat							731,250,000.00								
				Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat							292,500,000.00								
				Operasional Bus Sekolah							1,462,500,000.00								
				Operasional BRT sebanyak 30 unit							2,925,000,000.00								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi							1,462,500,000.00								
				Kajian Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area							487,500,000.00								
				Inventarisasi dan Penetapan Simpul/Terminal Implementasi Undang-Undang No 23 TH 2014							455,220,000.00								
				Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV									698,000,000.00						
				Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat									503,850,000.00						
				Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat									550,200,000.00						
				Penataan Terminal Penumpang Umum Tipe B									279,525,000.00						
				METR Penyusunan Rencana Detail Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Bandung Metropolitan Area									760,000,000.00						
				Pemilihan Awak kendaraan Umum Teladan (AKUT), Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat									452,750,000.00						
				Kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV											1,312,200,000.00				
				Kegiatan Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B											6,434,400,000.00				
				Kegiatan Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B											596,760,000.00				
				Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat											295,400,000.00				
				Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat											200,000,000.00				
				Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat											402,550,000.00				
				Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen dan Data Base Angkutan Umum Jawa Barat											397,800,000.00				
				Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Pemenang WTN Tahun 2016											2,621,000,000.00				
				Kegiatan Operasional Pelayanan Angkutan Umum di Jawa Barat											2,663,550,000.00				
				Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Jawa Barat											1,730,672,400.00				
				Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jawa Barat											370,650,000.00				
				Kegiatan Pemeliharaan dan Pengoperasian CCTV													1,402,450,000		
				Kegiatan Evaluasi angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat													332,400,000		
				Kegiatan Evaluasi Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalin di Jawa Barat													699,600,000		
				Kegiatan Pemilihan abdi yasa teladan, Wahana Tata Nugraha dan Pelajar Pelopor Transportasi Darat													623,180,000		
				Kegiatan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B													700,000,000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Kegiatan Penyusunan studi kelayakan terminal													1,000,000,000		
				Kegiatan Pengadaan kendaraan operasional untuk pemenang WTN Tahun 2017													486,700,000		
				Kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi darat													790,400,000		
				Kegiatan pembinaan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat													377,650,000		
				Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah I													199,990,000		
4	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	75.38%	1,185,668,250	76%	4,946,471,000	78%	3,059,500,000	79%	3,937,745,000	80%	4,066,700,000	81%	4,066,700,000	81%	4,066,700,000
				Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang			436,050,000												
				Pengendalian dan Pengawasan Sarana/ Prasarana Perhubungan			749,618,250												
				Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru					1,696,950,000.00										
				Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan					2,690,521,000.00										
				Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong					200,000,000.00										
				Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat					149,000,000.00										
				Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyeum Jalur Cianjur-Sukabumi					210,000,000.00										
				Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat							2,407,500,000.00								
				Pengembangan sistem e-enforcement di Jembetan Timbang Jawa Barat							652,000,000.00								
				Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru									2,647,545,000.00						
				Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat									1,290,200,000.00						
				Kegiatan Penyelenggaraan lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru											3,078,800,000.00				
				Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat											987,900,000.00				
				Kegiatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru													3,078,800,000		
				Kegiatan Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan di Jawa Barat													987,900,000		
5	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	72.89%	654,578,753	100%	223,500,000	100%	418,015,000	100%	432,835,000	100%	-	100%	-	100%	-
				Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Jawa Barat			51,342,500												
				Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat			181,207,253												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2014-2018)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Pengadaan Kendaraan Pemeriksaan dan Peralatan Pemeriksaan Produk Karoseri Kendaraan Bermotor			422,029,000												
				Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat					148,500,000										
				Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor					75,000,000										
				Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat							344,890,000.00								
				Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe							73,125,000.00								
				Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat									432,835,000.00						
					JUMLAH TOTAL		334,903,213,468		369,906,409,940		202,308,437,787		70,310,868,084		102,625,469,400		604,523,508,750		604,523,508,750
					TOTAL (000)				369,906,410		202,308,438		70,310,868		102,625,469		604,523,509		1,349,674,694

LAMPIRAN 5

Formulir S5

Tabel S-5

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Program	**Indikator Kinerja**	**Program**	**Satuan**	Kinerja Awal (Tahun 2013)	Indikator Kinerja Program				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	*persen*	23.08%	33.33%	44.44%	55.56%	66.67%	77.78%
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi berbadan hukum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	*persen*	0.17%	0.22%	25.17%	50.12%	75.06%	100.00%
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	*persen*	na	*88%*	*91%*	94%	97%	100%
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	*persen*	75.38%	76.00%	78%	79%	80%	81%
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	*persen*	72.89%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	*persen*	8.47%	11.34	23.39	45.64	70.32	78.99
		Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	*persen*	48.48%	51.5%	60.61%	66.67%	72.73%	78.79%
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	*persen*	72.83%	72.83%	73.56%	74.29%	75.03%	75.76%
4	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	*persen*	15.83%	17%	19.00%	21%	23%	25%

LAMPIRAN 6

Data-data kepegawaian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2008 – 2012 dan Data Kepegawaian Tahun 2014 serta Rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2013 – 2018

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PERIODE DESEMBER 2014

NO.	GOLONGAN	JML	%
1	IV/C	1	0.28
2	IV/B	4	1.12
3	IV/A	14	3.92
4	III/D	46	12.89
5	III/C	39	10.92
6	III/B	131	36.69
7	III/A	17	4.76
8	II/D	8	2.24
9	II/C	5	1.40
10	II/B	75	21.01
11	II/A	7	1.96
12	I/D	0	0.00
13	I/C	5	1.40
14	I/B	5	1.40
15	I/A	0	0.00
	JUMLAH	**357**	**100**

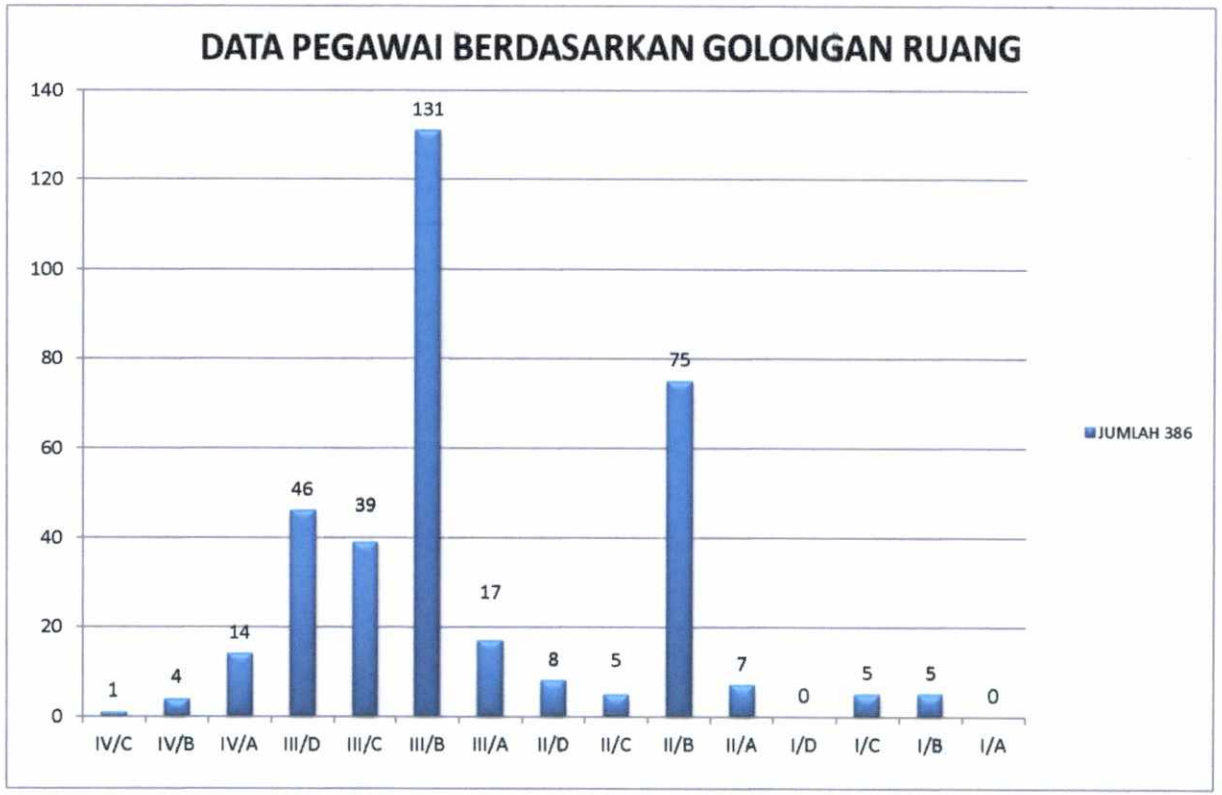

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PERIODE DESEMBER 2014

No.	TINGKAT IJAZAH	JML	%
1	S3	1	0.28
2	S2	35	9.80
3	S1	133	37.25
4	D4	3	0.84
5	SARMUD	0	0.00
6	D3	16	4.48
7	D2	4	1.12
8	D1	1	0.28
9	SLTA	147	41.18
10	SLTP	9	2.52
11	SD	8	2.24
	JUMLAH	**357**	**100**

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN USIA
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PERIODE DESEMBER 2014

No.	TINGKAT USIA	JML	%
1	20 - 24	0	0.00
2	25 - 29	5	1.40
3	30 - 34	22	6.16
4	35 - 39	33	9.24
5	40 - 44	63	17.65
6	45 - 49	99	27.73
7	50 - 54	86	24.09
8	55 <	49	13.73
	JUMLAH	**357**	**100**

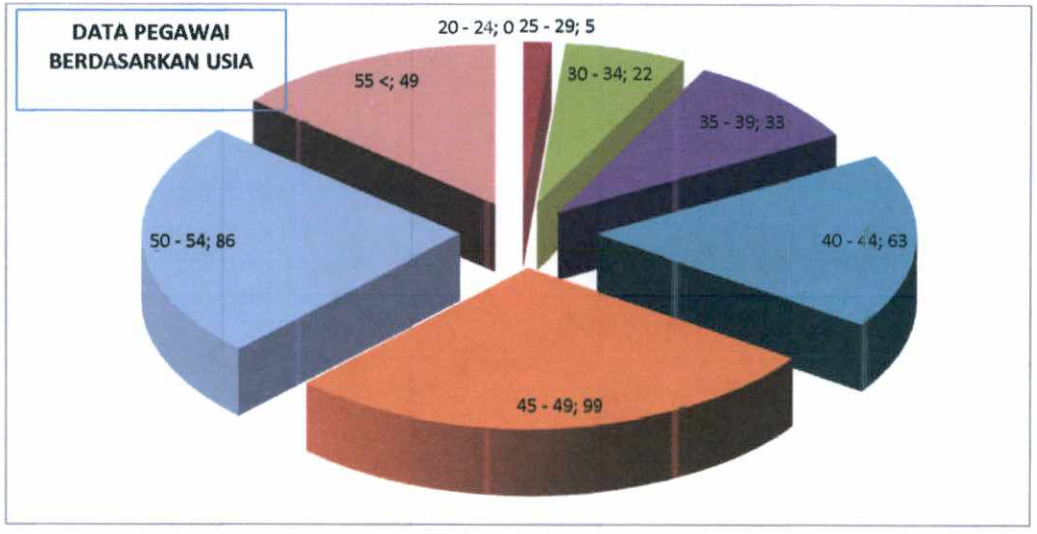

DATA PENSIUN BERDASARKAN GOLONGAN
DARI TAHUN 2013 - 2018

NO	GOLONGAN	TAHUN						KET.
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	IV/C							
2	IV/B		1	1				
3	IV/A				2		1	
4	III/D	1	5	5	3	3	2	
5	III/C	2	1		3	2		
6	III/B	10	11	4	11	8	8	
7	III/A		1	1				
8	II/D			1	1			
9	II/C	1						
10	II/B					2	1	
11	II/A	1	1	1		1	1	
12	I/D							
13	I/C					1		
14	I/B				1		1	
15	I/A							
	JUMLAH	**15**	**20**	**13**	**21**	**17**	**14**	

DATA PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT
DARI TAHUN 2008 - TAHUN 2013

NO.	NAMA DIKLAT	TAHUN						JUMLAH
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Barang Jasa Pemerintah				15	12	2	29
2	Penatausahaan Keuangan					2	1	3
3	Bendahara							0
4	Manajemen Kearsipan		1				2	3
5	Pengelolaan Barang Daerah					3	3	6
6	Analisis Beban Kerja				1			1
7	TOT Calon Widyaiswara			2				2
8	Diklatpim Tk. III		1		2	1		4
9	Diklatpim Tk. IV			1	2	3	2	8
10	PPNS		1	2	2		1	6
11	Operator Jembatan Timbang (OJT)					24	20	44
12	Analisis Dampak Lingkungan Lalin					1	2	3
13	Manajemen Fasilitas LLAJ					1	3	4
14	Orientasi LLAJ Tk. I							0
15	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas							0
16	Manajemen Transportasi Perkotaan						1	1
17	Logistik dan Pergudangan						6	6
18	Jalur dan Bangunan Kereta Api						1	1
19	Penyusunan Jaringan LLAJ				1			1
20	Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)					1		1
21	PKB Lanjutan				2			2
22	Intelegency Transport System (ITS)						2	2
23	Aerodrome Flight Service (AFS)						2	2
24	Bangunan dan Landasan			1				1
25	Keudaraan Tk. Sarjana			1				1
26	Keselamatan Pelayaran ASDP						4	4
27	Manajemen Operasional LASDP			2	2			4
			3	9	27	48	52	**139**

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2012

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2008	2009	2010	2011	2012	Sep-13	
1	IV/C	1	0	0	1	0	0	
2	IV/B	7	7	3	3	2	3	
3	IV/A	8	6	7	8	10	14	
4	III/D	26	28	28	30	36	39	
5	III/C	31	35	38	42	38	32	
6	III/B	144	117	116	124	129	132	
7	III/A	102	107	105	82	55	39	
8	II/D	42	28	12	10	11	11	
9	II/C	19	16	15	14	9	5	
10	II/B	8	6	2	11	40	71	
11	II/A	47	75	80	72	45	12	
12	I/D	0	0	0	0	0	0	
13	I/C	5	7	4	2	2	2	
14	I/B	0	0	1	3	3	3	
15	I/A	5	11	10	8	6	6	
	JUMLAH	**445**	**443**	**421**	**410**	**386**	**369**	

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 - 2012

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2008	2009	2010	2011	2012	Sep-13	
1	S3	1	0	0	0	1	1	
2	S2	32	27	27	29	31	32	
3	S1	84	98	109	130	134	135	
4	D4	3	3	6	6	5	4	
5	SM	1	1	1	1	0	0	
6	D3	16	19	18	20	19	18	
7	D2	6	5	4	4	4	4	
8	D1	3	3	2	2	2	2	
9	SLTA	268	250	223	190	166	151	
10	SLTP	18	18	15	12	12	11	
11	SD	13	18	16	16	12	11	
	JUMLAH	**445**	**442**	**421**	**410**	**386**	**369**	

REKAP DATA KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2013-2018
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	III	34	40	45	43	46	49	
	II	121	135	143	166	180	191	
	Jumlah	155	175	188	209	226	240	

DATA KEBUTUHAN PENDIDIKAN FORMAL

NO.	GOLONGAN	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	S1	27	28	33	43	46	49	
	D3	33	39	42	42	43	44	
	D2	8	8	8	9	9	9	
	SLTA	87	100	105	115	128	138	
	Jumlah	155	175	188	209	226	240	

DATA KEBUTUHAN DIKLAT

NO	DIKLAT	TAHUN						KET
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	DIKLAT BIDANG KETATAUSAHAAN	17	19	21	22	25	29	
2	DIKLAT BIDANG DARAT	74	87	91	100	106	112	
3	DIKLAT BIDANG LAUT	3	4	3	3	9	9	
4	DIKLAT BIDANG UDARA	13	13	16	17	17	18	
5	DIKLAT LAIN-LAIN	48	52	57	67	69	72	
	JUMLAH	155	175	188	209	226	240	

LAMPIRAN 7

Struktur Organisasi UPTD/Balai di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

(Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN BANDAR UDARA
(Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009)

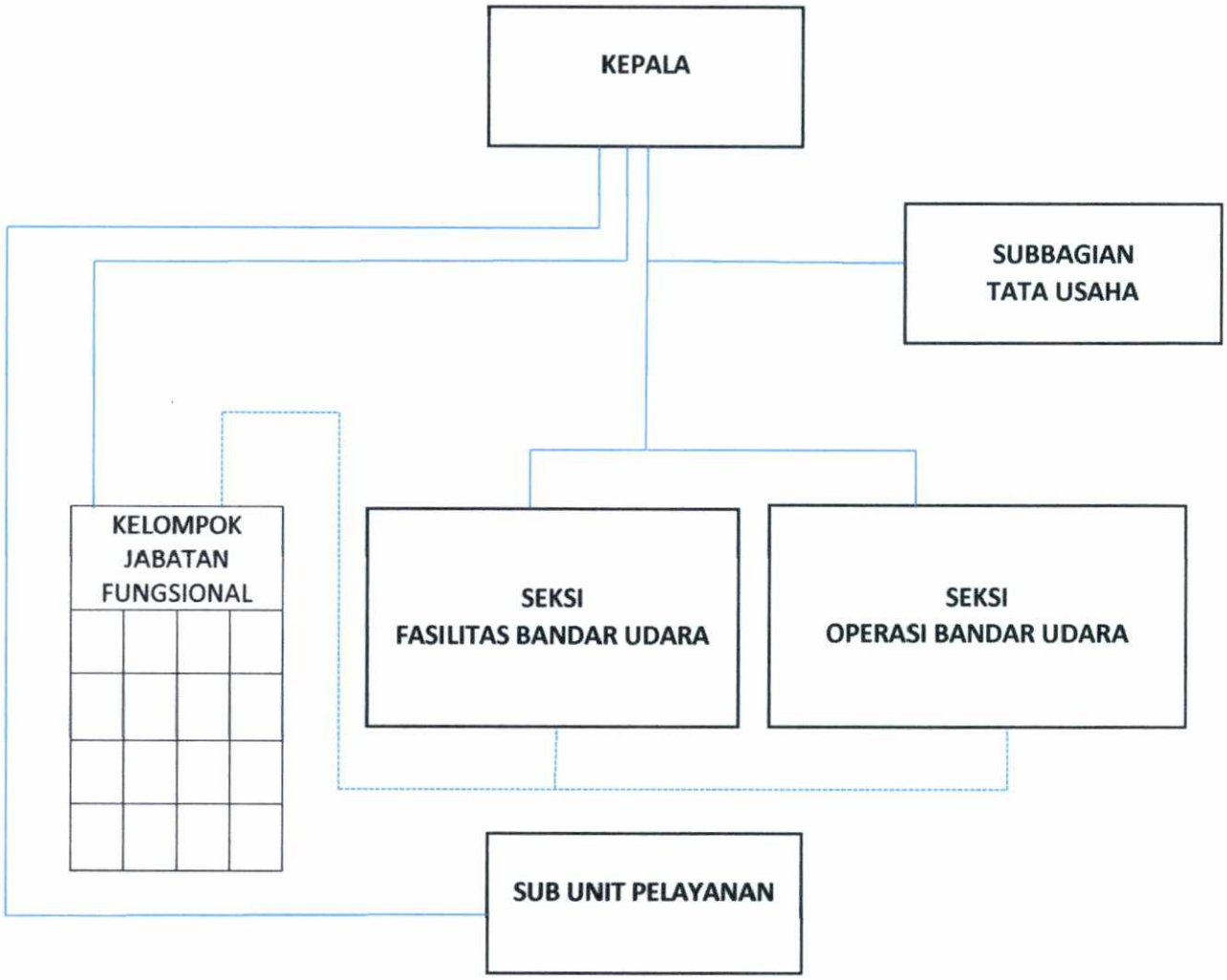

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN LAUT,ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBRANGAN
(Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009)

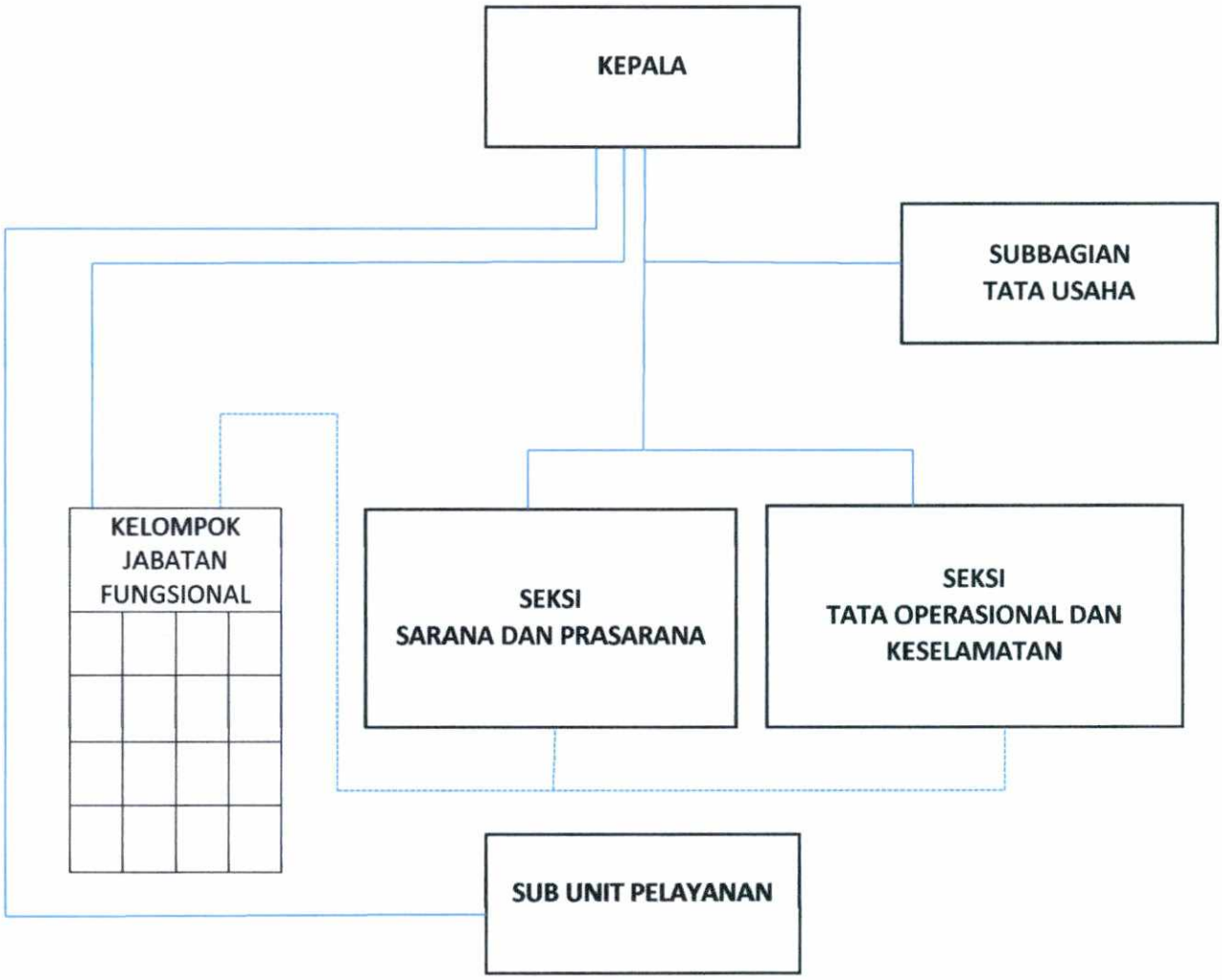
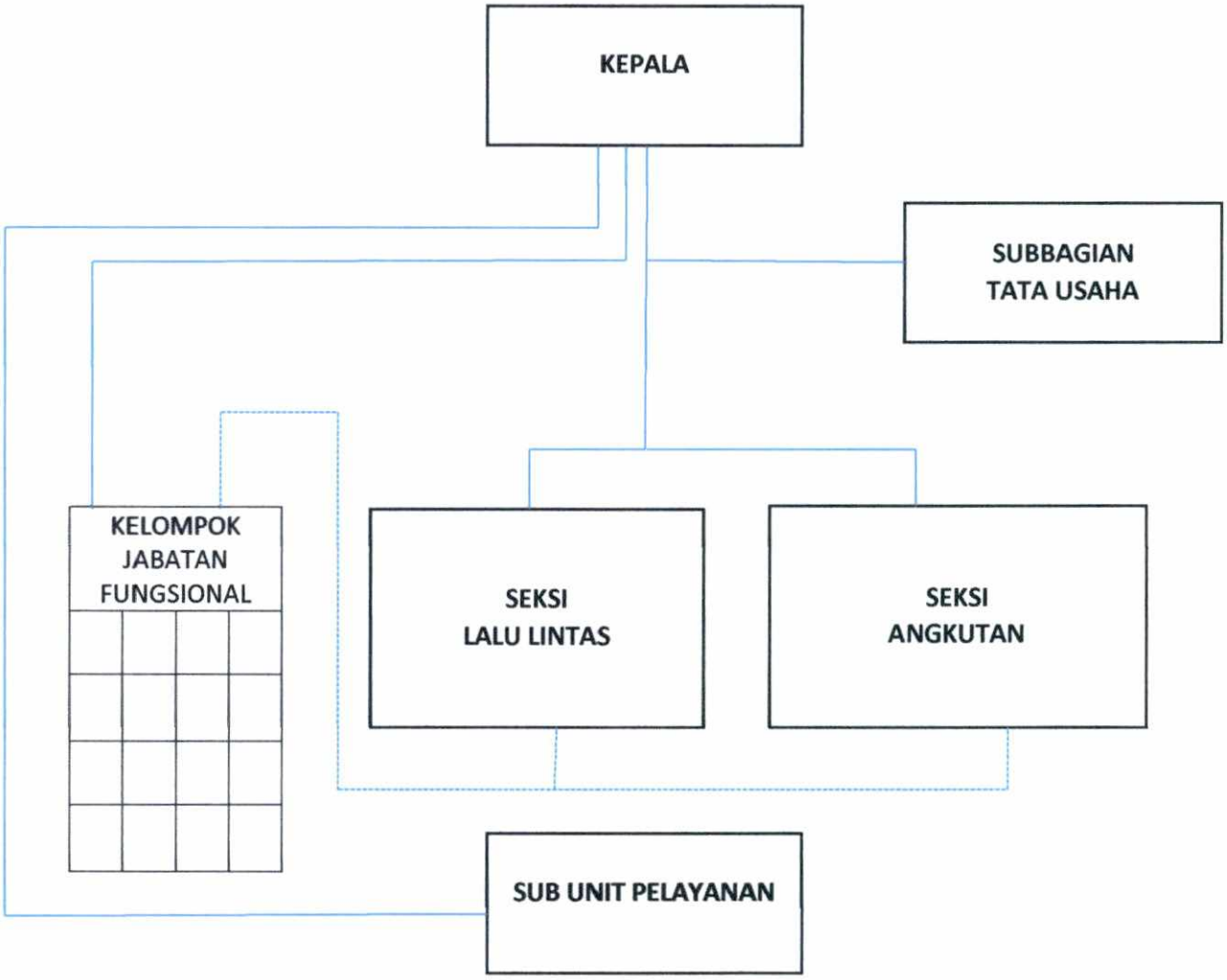
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN WILAYAH I CIREBON PRIANGAN
DAN
UPTD LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN WILAYAH II BOGOR – PURWAKARTA
(Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009)